

LKJIP TAHUN 2023

KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Ini dapat memberikan manfaat yang optimal

Pemalang, 20 Maret 2024



AGUS SYARIF NURHADI, S.H

Pembina

NIP. 19680813 199903 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Watukumpul yang dicapai di tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang prima

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan

Tahun 2023 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang menargetkan 86 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Adapun realisasinya adalah sebesar 90,48 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan untuk tahun 2023 adalah sebesar 105,21 %.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan

Indikator : Cakupan Layanan Kecamatan

Tahun 2023 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang menargetkan 94,67 untuk indikator Cakupan Layanan Kecamatan adapun realisasinya adalah sebesar 94,67 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Cakupan Layanan Kecamatan untuk tahun 2023 adalah sebesar 100,00 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
2. Kondisi geografis alam yang berbukit dan banyak daerah potensi bencana longsor dan akses jalan yang masih sulit serta terdapat daerah-daerah yang *blank signal*;
3. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
5. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
7. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis;
8. Penanganan pengaduan masyarakat kurang maksimal karena belum berfungsinya SMS center Kecamatan Watukumpul;
9. Dalam bidang partisipasi yaitu peran aktif masyarakat masih rendah dan masih kurang berfungsinya organisasi-organisasi kelembagaan masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
i. Kondisi Geografis dan Demografis	2
ii. Struktur Organisasi	2
iii. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Isu Strategis	4
C. Keuangan	4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	5
A. Perencanaan Strategis	5
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	5
ii. Strategi dan Arah Kebijakan	7
B. Perjanjian Kinerja	8
C. Rencana Anggaran	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Akuntabilitas Anggaran	23
i. Realisasi Anggaran	23
ii. Analisis Efisiensi Sumber Daya	24
C. Inovasi	26
BAB 4 PENUTUP	27
A. Kesimpulan	27
B. Rencana Tindak Lanjut	28

LAMPIRAN

(PK Perubahan 2023, IKU 2023, LHE Inspektorat, Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat, dokumentasi inovasi, Cascading, Pengukuran Kinerja Tahun 2023, Capaian Anggaran Pendukung Sasaran, Nilai SKM)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tabel Data Penduduk Perwilayah Desa Tahun 2023	2
Tabel 2.1	: Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	6
Tabel 2.2	: Tabel Sasaran dan Program.....	7
Tabel 2.3	: Tabel Strategi dan Arah Kebijakan	7
Tabel 2.4	: Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
Tabel 2.5	: Tabel Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2023	9
Tabel 2.6	: Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	12
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel 3.2	: Tabel Capaian Kinerja atas Perjanjian Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	15
Tabel 3.3	: Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima	16
Tabel 3.4	: Rangkuman Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan Watukumpul.....	17
Tabel 3.5	: Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan.....	18
Tabel 3.6	: Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023	24
Tabel 3.7	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Sasaran Strategis Kec. Watukumpul Kab. Pemalang Tahun 2023	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul	3
Gambar 3.1	: Inovasi Kecamatan Watukumpul.....	26

BAB 1

Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
 - i. Kondisi Geografis dan Demografis
 - ii. Struktur Organisasi
 - iii. Tugas Pokok & Fungsi
- B. Isu Strategis
- C. Keuangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pemalang dalam kerangka integrasi perwujudan visi Kabupaten Pemalang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

i. Kondisi Geografis dan Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Watukumpul menurut Laporan Monografi Semester II pertanggal 31 Desember 2023 mencapai 78.829 jiwa yang terdiri dari laki-laki 39.875 jiwa dan Perempuan 38.954 jiwa. Adapun persebaran penduduk menurut wilayah desa/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penduduk Perwilayah Desa Tahun 2023

No	Desa	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Wisnu	3.230	1.648	1.582
2.	Majakerta	5.557	2.757	2.800
3.	Tambi	2.521	1.293	1.228
4.	Watukumpul	5.260	2.716	2.544
5.	Majalangu	9.157	4.786	4.371
6.	Jojogan	4.311	2.172	2.139
7.	Cikadu	8.424	4.378	4.046
8.	Bongas	7.020	3.436	3.584
9.	Tundagan	7.335	3.631	3.704
10.	Medayu	2.146	1.074	1.072
11.	Cawet	3.564	1.779	1.785
12.	Pagelaran	2.098	1.060	1.038
13.	Tlagasana	10.827	5.425	5.402
14.	Bodas	3.753	1.865	1.888
15.	Gapura	3.626	1.855	1.771
	Jumlah	78.829	39.875	38.954

Sumber : Monografi Kecamatan Watukumpul Semester II Tahun 2023

Distribusi penduduk menurut desa/kelurahan, memperlihatkan Desa Tlagasana adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 10.827 jiwa (13,73 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Watukumpul), sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Desa Pagelaran, yaitu sebesar 2.098 jiwa (2,66 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Watukumpul). Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 78.585 jiwa/km² pada tahun 2022 menjadi 78.829 jiwa/km² pada tahun 2023.

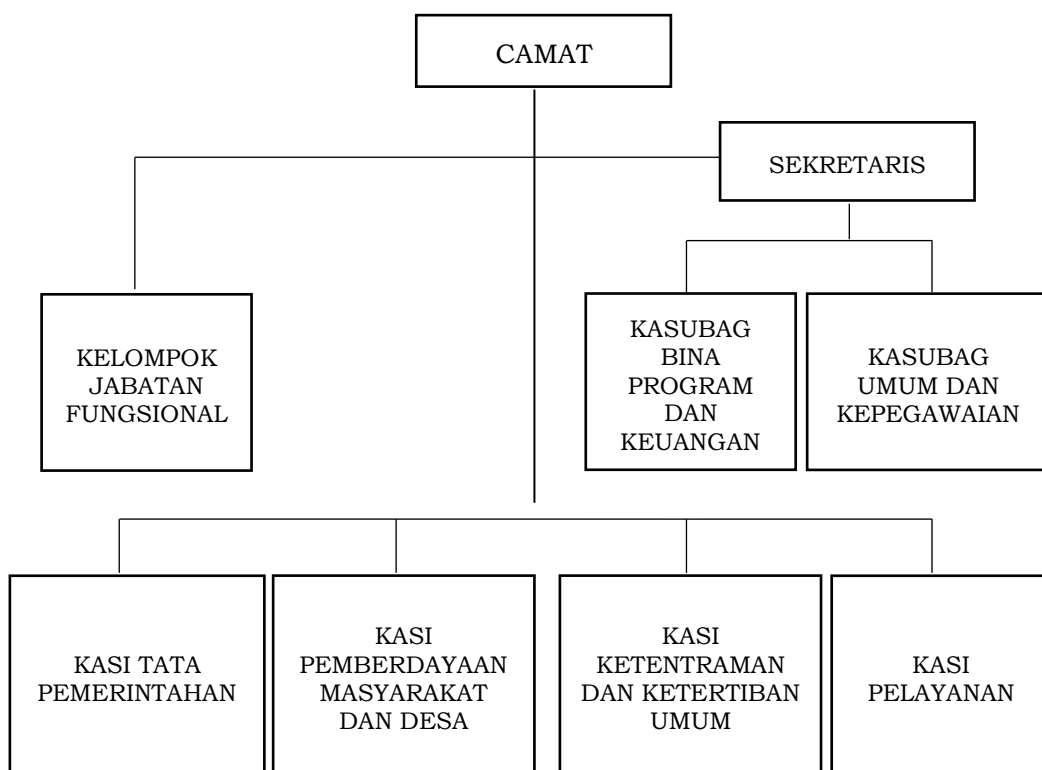
ii. Struktur Organisasi

Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi:
 - Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kepala Seksi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul



iii. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- 7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan Administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup kerjanya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
2. Kondisi geografis alam yang berbukit dan banyak daerah potensi bencana longsor dan akses jalan yang masih sulit serta terdapat daerah-daerah yang *blank signal*;
3. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
5. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
7. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis;
8. Dalam bidang partisipasi yaitu peran aktif masyarakat masih rendah dan masih kurang berfungsinya organisasi-organisasi kelembagaan masyarakat.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.534.832.500,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.994.292.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 540.540.500,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Belanja tidak langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 1.994.292.000,- yang didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang dari APBD sebesar Rp. 540.540.500,- yang didukung oleh 5 program dan 12 kegiatan.

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- C. Rencana Anggaran Tahun 2023

1. PERENCANAAN STRATEGIS

Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke-2 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja / Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82	84	86	88	90	92
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	93,33	94,67	94,67	96,00	96,00	97,33

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tabel Sasaran dan Program

No	Sasaran	Program
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3

Tabel Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	1.1 Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif
			1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan
		2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir
			2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman
			2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
		3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan

		4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten
			4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin
		5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa
			5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam
		6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset
			6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD

2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86	-	86	-	86
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67

3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 2.517.421.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.981.880.500,- dan Belanja Langsung Rp. 535.540.500,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 2.534.832.500,-.

Adapun target belanja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tabel Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2023

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Kecamatan Watukumpul	2.534.832.500
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.310.681.000
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	14.500.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.996.292.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.994.292.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	89.859.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.650.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.528.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.033.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.648.000
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	166.690.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.130.000

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.560.000
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	43.340.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.350.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.000.000
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	5.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	16.000.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000
7.01.02.2..03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	5.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55.275.000
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	55.275.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	35.275.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000
7.01.04.2.02	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	5.000.000

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.140.000
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	27.140.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.140.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	110.736.500
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	110.736.500
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.839.500
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.982.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan	8.625.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.500.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.410.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.000.000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	11.380.000

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	2.310.681.000	91,16	Didukung oleh satu (1) program: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	224.151.500	8,84	Didukung oleh lima (5) program: 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Anggaran
- C. Inovasi

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91 %	Sangat Baik	
2.	76 – 90 %	Tinggi	
3.	66 – 75 %	Sedang	
4.	51 – 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Capaian Kinerja atas Perjanjian Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	KINERJA s/d 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	86	90,48	105,21	92	98,35
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	94,67	94,67	100,00	97,33	97,27

Sumber : Kecamatan Watukumpul Tahun 2023, diolah

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima

Tabel 3.3

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra	
	2020	2021		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2026	Kinerja s.d. 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	88,27	89,88	90,21	86	90,48	105,21	92	98,35
Persentase Capaian Sasaran 1						105,21		98,35

Sumber: Kecamatan Watukumpul tahun 2023, diolah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kecamatan Watukumpul guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pengukuran ini bertujuan agar Kecamatan Watukumpul dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan secara detil, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan layanan. Sejak tahun 2021, Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sepanjang tahun dan dilaporkan dua kali (per semester) sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat tahunan diperoleh dari rerata IKM semester 1 dan IKM semester 2.

Sepanjang tahun 2023, Kecamatan Watukumpul setidaknya telah melaksanakan survei terhadap 106 pengguna layanan. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada Semester 1 adalah sebesar 90,45 sedangkan pada Semester 2 sebesar 90,50, sehingga IKM Kecamatan Watukumpul di tahun 2023 adalah sebesar 90,48 dengan kategori Tinggi Jika dibandingkan dengan target di tahun 2023 sebesar 86, maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Watukumpul tahun 2023 mencapai 105,21%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026, maka capaian kinerjanya mencapai 98,35%.

Berdasarkan hasil survei, maka dapat disimpulkan bahwa di tahun 2023 Semester 2, komponen yang tertinggi adalah produk spesifikasi sedangkan yang terendah adalah penanganan pengaduan. Hasil IKM ini menjadi cerminan sudut pandang masyarakat mengenai gambaran layanan Kecamatan Watukumpul, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar masukan dalam upaya peningkatan layanan Kecamatan Watukumpul. Rangkuman hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang:

Tabel 3.4

**Rangkuman Hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik
Kecamatan Watukumpul**

No	Unsur Layanan	Nilai		Mutu Pelayanan	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	2		3		4
1	Syarat	89,41	89,39	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Prosedur	88,98	88,92	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	89,41	88,92	Sangat Baik	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	93,64	93,63	Sangat Baik	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi	96,61	96,23	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	91,53	91,75	Sangat Baik	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	91,10	91,27	Sangat Baik	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	88,56	88,92	Sangat Baik	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	85,59	86,32	Baik	Sangat Baik
IKM		90,45	90,50	Sangat Baik	Sangat Baik
Rerata		90,48			

Permasalahan

1. Sarana dan prasarana pelayanan terhadap pengaduan perlu dilengkapi untuk menciptakan keefektifan dan kenyamanan pelayanan.

Solusi

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.

Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan kecamatan

Tabel 3.5

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra	
	2020	2021		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2026	Kinerja s.d. 2023
Cakupan layanan kecamatan	91,11	91,11	90,89	94,67	94,67	100,00	97,33	97,27
Persentase Capaian Sasaran 2						100,00		97,27

Sumber: Kecamatan Watukumpul tahun 2023, diolah.

Indikator Cakupan Layanan Kecamatan diperoleh dari rerata perhitungan 5 (lima) sub indikator pelayanan yang ada di Kecamatan Watukumpul. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (1)\text{Persentase pelayanan publik yang tersedia}+ \\ & (2)\text{Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif}+ \\ & (3)\text{Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan} \\ & \text{yang dapat diselesaikan}+ \\ & (4)\text{Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan} \\ & \text{yang tertangani}+ \\ & (5)\text{Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik} \end{aligned}$$

$$\text{Cakupan Layanan Kecamatan} = \frac{\text{Total Persentase}}{5}$$

Mendasari formulasi di atas, untuk memperoleh nilai realisasi Cakupan Layanan Kecamatan diperlukan perhitungan kinerja realisasi masing-masing sub indikatornya terlebih dahulu.

Di sepanjang tahun 2023, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang tersedia;

Indikator ini menunjukkan sejauhmana kinerja pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Watukumpul kepada masyarakat. Indikator ini diukur melalui hasil rerata dari Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas; persentase jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas, dan persentase jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas. Di tahun 2023, telah dilaksanakan layanan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas;

Terdapat 5 dokumen pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan. Hingga akhir tahun 2023, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan kegiatan tersebut diatas yaitu Rakor Kades pada triwulan 2 yang dilakukan secara 2 kali, Rakor Kades pada triwulan 3, Rakor Sekdes, Pengelolaan Aset Desa Kecamatan Watukumpul.

Mendasari hal tersebut, maka realisasi Persentase data pemerintahan yang dipublikasi adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan} \\ & \text{pemerintahan di tingkat kecamatan}}{\text{target jumlah dokumen peningkatan efektifitas} \\ & \text{kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan}} \times 100 \\ & = \frac{5}{5} \times 100 = 100 \% \end{aligned}$$

- b. Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas;

Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan diperoleh dari:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang} \\ & \text{tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada} \\ & \text{di kecamatan yang tersusun}}{\text{jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang} \\ & \text{tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada} \\ & \text{di kecamatan yang tersusun}} \times 100 \\ & = \frac{15}{15} \times 100 = 100 \% \end{aligned}$$

Di tahun 2023, terdapat 15 dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, yang meliputi:

- 10 dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- 2 laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- 3 laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Dari seluruh aduan tersebut, telah diselesaikan sebanyak 15 dokumen atau telah berkinerja mencapai 100 %.

- c. Persentase jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, terdapat 30 jenis layanan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Bidang Sosial), Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Perhubungan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, PMD), Urusan Pemerintahan Pilihan (Sumber Daya Air dan Mineral, Perdagangan), dan Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan).

Pada tahun 2023, terdapat 24 layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Watukumpul dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan pendataan Anak Usia Sekolah (AUS), Anak putus sekolah, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di wilayahnya
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan kelembagaan bidang kesehatan tingkat kecamatan, meliputi : Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS), Satgas GSIBA Kecamatan, Tim STBM Kecamatan, Tim Penanggulangan TBC Kecamatan
- Menyenggarakan penertiban pelanggaran pendirian bangunan di atas sempadan dan di saluran tersier
- Menyenggarakan sosialisasi pemberdayaan linmas dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- Menyenggarakan penyelesaian gangguan Trantib yang bersifat umum di wilayahnya
- Menyenggarakan pelatihan Linmas dalam penanggulangan bencana di wilayahnya
- Menyenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan eksekusi korban bencana kebakaran
- Menyenggarakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- Mengkoordinasikan pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, serta Wanita rawan sosial ekonomi
- Membina kegiatan Karang Taruna, Petugas Sosial Masyarakat (PSM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)
- Menyenggarakan pendataan penanganan pengemis, gelandangan, gangguan jiwa dan anak terlantar (PGOT) di luar panti
- Merekomendasikan penerimaan bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Menyenggarakan pendataan/pemutahiran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Menyenggarakan pendataan korban bencana
- Menertibkan izin penutupan / penggunaan jalan lokal/desa di wilayah kecamatan setempat untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas/transportasi
- Melaksanakan pembinaan, perlindungan koperasi dan Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah kerjanya
- Menertibkan surat keterangan lokasi pendirian koperasi, KC, KCP, dan Kas
- Menyenggarakan penelitian berkas usulan pengesahan anggota BPD
- Menyenggarakan pengucapan sumpah janji, peresmian dan pengesahan anggota BPD
- Menyenggarakan pengesahan pemberhentian anggota BPD
- Menyenggarakan pengisian dan pengesahan pengangkatan anggota BPD antarwaktu menjadi anggota BPD
- Menyenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa antarwaktu

- Melaksanakan pembinaan penyuluhan pengendalian fungsi, dan pemanfaatan jaringan irigasi primer dan sekunder
- Menyelenggarakan pengawasan kas opname anggaran desa

Berdasarkan data tersebut di atas, maka Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia di tahun 2023 adalah:

$$= \frac{\text{jumlah layanan berdasar pelimpahan kewenangan yang diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh permintaan layanan berdasar pelimpahan kewenangan}} \times 100$$

$$= \frac{24}{30} \times 100 = 80 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui **Persentase Pelayanan Publik yang tersedia** pada Kecamatan Watukumpul di tahun 2023 adalah **sebesar 93,33 %**, dengan rician sebagai berikut:

$$= \frac{\begin{aligned} &\% \text{dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat} \\ &\text{kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas} + \% \text{jumlah dokumen} \\ &\text{penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja} \\ &\text{perangkat daerah yang ada di kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas} + \\ &\% \text{jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada} \\ &\text{camat yang menunjang pelaksanaan tugas} \end{aligned}}{3} \times 100$$

$$= \frac{100\% + 100\% + 80\%}{3} = 93,33 \%$$

2. Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif;

Sub indikator Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Aktif diperoleh dari Rerata Persentase jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, dan jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Makin tinggi hasil realisasinya menunjukkan makin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan tersebut.

Persentase keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Musrembang dapat diukur dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\begin{aligned} &\% \text{Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan} \\ &\text{masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta} \\ &\text{di wilayah kerja kecamatan} + \% \text{Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan} \\ &\text{pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan} \end{aligned}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun}} \times 100$$

$$= \frac{100\% + 100\%}{2} = 100 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui **Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif** pada Kecamatan Watukumpul di tahun 2023 adalah **sebesar 100 %**.

3. Presentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\begin{aligned} &\text{Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan} \\ &\text{peraturan kepala daerah} \end{aligned}}{\text{Target jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah}} \times 100$$

$$= \frac{2}{2} \times 100 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui **Persentase Gangguan Trantibum Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2023 mencapai 100%**.

4. Presentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun}}{\text{Target jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun}} \times 100$$

$$= \frac{5}{5} \times 100 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui **Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2023 mencapai 100%**.

5. Presentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Sub indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Desa Bertata kelola Pemerintahan yang Baik diukur dari kelengkapan serta kualitas administrasi desa, yang meliputi (1) penetapan dokumen perencanaan desa tepat waktu, (2) ketersediaan Perdes dan Perkades, (3) keterisian buku administrasi Pemerintah Desa, (4) laporan keuangan desa yang tepat waktu, (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas sesuai ketentuan, terjaganya ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan Watukumpul memiliki 15 desa. Di tahun 2023, Kecamatan Watukumpul telah melakukan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Mendasari kegiatan tersebut, maka dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Watukumpul, terdapat 12 desa yang termasuk dalam kategori desa bertata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan sisanya belum dapat memenuhi kelengkapan dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Cawet; belum mencukupi semua dokumen administrasi desa
- Desa Medayu; belum mencukupi semua dokumen administrasi desa
- Desa Tlagasana; belum mencukupi semua dokumen administrasi desa

Berdasarkan hal tersebut, maka **Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik** Kecamatan Watukumpul di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$$

$$= \frac{12}{15} \times 100 = 80$$

Mendasari hasil perhitungan dari kelima sub indikator sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Cakupan Layanan Kecamatan Watukumpul tahun 2023 adalah:

$$\begin{aligned}
& (1)\text{Persentase pelayanan publik yang tersedia}+ \\
& (2)\text{Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif}+ \\
& (3)\text{Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan} \\
& \quad \text{yang dapat diselesaikan}+ \\
& (4)\text{Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan} \\
& \quad \text{yang tertangani}+ \\
& (5)\text{Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik} \\
\text{Cakupan Layanan Kecamatan} = & \frac{\hspace{10em}}{5} \\
= & \frac{93,33\% + 100\% + 100\%+100\%+80\%}{5} = 94,67\%
\end{aligned}$$

Permasalahan

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
2. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
4. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
6. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun herisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis.

Solusi

1. Mengoptimalkan ketersediaan SDM dan alokasi anggaran yang ada untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin
2. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin
4. Mengoptimalkan pengelolaan system informasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah.
5. Dibuatkan jadwal monitoring dan evaluasi secara mendetail lengkap dengan personil/SDM yang ditugaskan
6. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur secara rutin

Program Pendukung

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

i. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	2.310.681.000	2.185.329.895	94,58
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	224.151.500	223.892.485	99,88
Jumlah		2.534.832.500	2.409.222.380	

ii. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	86	90,48	105,21	2.310.681.000	2.185.329.895	94,58	10,63
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	94,67	94,67	100,00	224.151.500	223.892.485	99,88	0,12

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2023, semua sasaran telah mencapai efisiensi sumberdaya, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima dengan presentase capaian anggaran sebesar 94,58 % namun dapat memenuhi capaian kinerja 105,21 % sehingga ada efisien sebesar 10,63 %
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dengan presentase capaian anggaran sebesar 99,88 % namun dapat memenuhi capaian kinerja 100,00 % sehingga ada efisien sebesar 0,12 %

C. INOVASI

Seiring dengan perkembangan teknologi, Kecamatan Watukumpul terus berupaya mempermudah proses pelayanan administrasi. Tahun 2023 Kecamatan Watukumpul melakukan inovasi baru pada pelayanan administrasi secara online 'PEMALANG (PElayanan MAndiri LAN ora NGantri)'. PEMALANG merupakan modifikasi antara pelayanan mandiri dengan google form untuk mempermudah dalam pelayanan Surat Pindah/Datang Penduduk dan Dispensasi Nikah. Keuntungan lainnya yaitu proses pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan praktis. Upaya yang bisa dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan sosialisasi perencanaan pelayanan administrasi berbasis online yang dapat diikuti oleh petugas/pelaksana desa se-Kecamatan. Adanya program ini diharapkan agar memudahkan masyarakat dalam mengurus data dan dokumen yang mampu diakses dimana saja, kapan saja bahkan efektif dan efisien.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Mengingat terbatasnya SDM maka kegiatan perencanaan pelayanan administrasi online belum bisa maksimal.
2. Sarana dan prasarana pelayanan administrasi online belum memadai.

Solusi yang dilakukan :

1. Peningkatan kapasitas aparatur secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan administrasi online.
2. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi online secara bertahap.

Gambar 3.1
Inovasi Kecamatan Watukumpul



BAB 4

Penutup

A. Kesimpulan

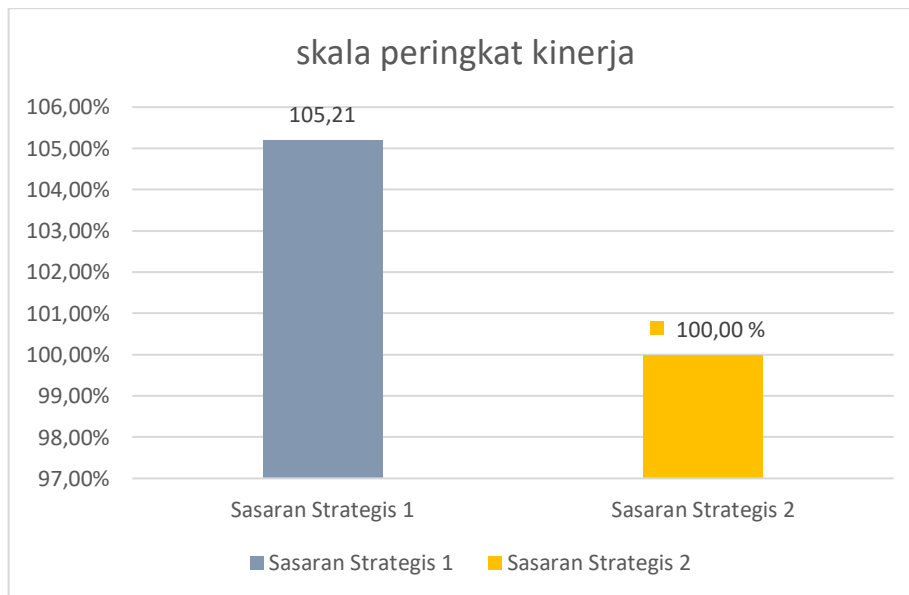
B. Rencana Tindak Lanjut

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

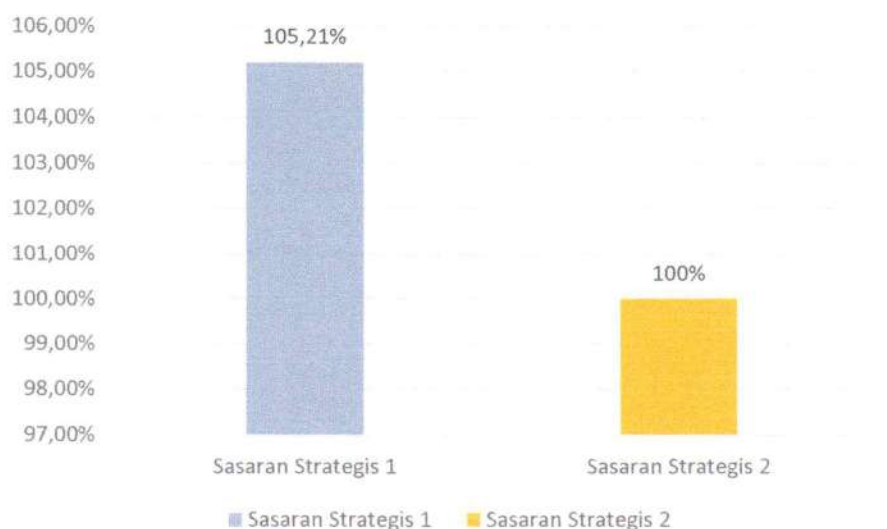
1. Berdasarkan skala peringkat kinerja, dari 2 sasaran strategis dapat diurutkan sebagai berikut:
 - a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima dengan capaian kinerja 105,21%;
 - b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan capaian kinerja 100,00%.



Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Skala Peringkat Kinerja

2. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 100%, dari 2 sasaran strategis, terdapat 50% atau 1 sasaran yang tercapai yaitu Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima dengan capaian kinerja sebesar 105,21%, sedangkan 50% atau 1 sasaran yang tercapai yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.

pemenuhan capaian kinerja 100%



Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja 100%

B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan Berdasarkan hasil capaian kinerja Kecamatan Watukumpul tahun 2023 tersebut, maka strategi peningkatan kinerja untuk tahun selanjutnya antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas aparatur secara rutin.
- Koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait perencanaan pembangunan wilayah desa.
- Dibuatkan jadwal monitoring dan evaluasi secara mendetail lengkap dengan personil/SDM yang ditugaskan guna perencana pada tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan pegawai/SDM baik secara vertikal maupun horisontal guna kegiatan yang kurang strategis dapat diselesaikan dengan baik.
- Mengoptimalkan SMS Center kecamatan agar penanganan pengaduan masyarakat senantiasa tertangani dengan cepat dan tepat.

CAMAT WATUKUMPUL



AGUS SYARIF NURHADI, S.H

Pembina

NIP. 19680813 199903 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI SARWOAJI, AP, MH
Jabatan : CAMAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MANSUR HIDAYAT, S.T.
Jabatan : BUPATI PEMALANG
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

MANSUR HIDAYAT, S.T.

Pihak Pertama,
CAMAT WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG

DEDI SARWOAJI, AP, MH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86	-	86	-	86
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67

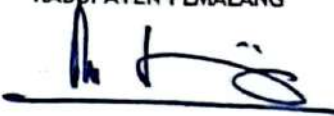
No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.310.681.000	DAU
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.000.000	DAU
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.275.000	DAU
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	DAU
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.140.000	DAU
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110.736.500	DAU
JUMLAH		2.534.832.500	

Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG


MANSUR HIDAYAT, S.T.

Pihak Pertama,
CAMAT WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG


DEDI SARWOAJI, AP, MH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI WAHYU NIKMAH, SE
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Watukumpul
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDI SARWOAJI, AP, MH
Jabatan : Camat Watukumpul
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul

DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan Watukumpul

SITI WAHYU NIKMAH, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Laporan	15
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Paket	67
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Laporan	72
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	22

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000	3.497.000	2.867.000	6.736.000	1.400.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.996.292.000	425.288.745	566.251.660	566.251.660	438.499.935
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.859.000	25.883.400	19.808.450	23.900.000	20.267.150
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.690.000	40.890.000	41.400.000	42.250.000	42.150.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.340.000	10.352.000	9.084.750	12.769.150	11.134.100
Total Anggaran		2.310.681.000	505.911.145	639.411.860	651.906.810	513.451.185

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul


DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU NIKMAH, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SITI KHOPSAH
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDI SARWOAJI, AP, MH
Jabatan : Camat Watukumpul
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul

DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Ir. SITI KHOPSAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN WATUKUMPUL
SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5.00	3	1	1	0
2	Tertindakannya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2.00	0	2	0	0
3	Tertindakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	15.00	15	0	0	0
4	Tertindakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15.00	5	7	0	3
5	Tertindakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	15.00	0	5	10	0
6	Tertindakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	15.00	7	3	5	0
7	Tertindakannya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4.00	0	4	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	1.658.000	1.296.000	1.650.000	396.000
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	625.000	6.075.000	2.600.000	700.000
3	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.839.500	3.202.500	0	2.475.000	1.162.000
4	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.982.000	3.288.000	4.494.000	0	5.200.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	0	3.611.000	6.389.000	0
6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.625.000	3.892.000	1.133.000	3.600.000	0
7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.500.000	0	5.000.000	0	2.500.000

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tata Pemerintahan



Ir. SITI KHOPSAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDI SARWOAJI, AP, MH
Jabatan : Camat Watukumpul
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul

DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN WATUKUMPUL
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tertindakannya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1.00	1	0	0	0
2	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	2	2	1	0
3	Tertindakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15.00	3	6	6	0
4	Tertindakannya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	15.00	6	6	3	0
5	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15.00	0	0	7	8
6	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1.00	1	0	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	35.275.000	35.275.000	0	0	0
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	6.718.000	6.700.000	6.582.000	0
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000	6.750.000	15.250.000	13.000.000	0
4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.410.000	4.866.000	4.544.000	1.000.000	0
5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.000.000	0	0	2.250.000	5.750.000
6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.380.000	2.763.000	1.650.000	2.442.000	4.525.000

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul


DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GIGIH PANUNTUN, S.ST
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDI SARWOAJI, AP, MH
Jabatan : Camat Watukumpul
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul

DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pelayanan

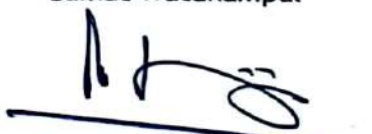
GIGIH PANUNTUN, S.ST

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN WATUKUMPUL
SEKSI PELAYANAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	10.00	5	4	1	0
2	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2.00	1	1	0	0
3	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3.00	3	0	0	0
4	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	600.00	35	15	35	515

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000	2.904.000	2.400.000	558.000	138.000
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	135.000	2.375.000	120.000	2.370.000
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	2.370.000	125.000	2.375.000	130.000
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	890.000	2.760.000	882.000	468.000

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pelayanan



GIGIH PANUNTUN, S.ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS YUGO SAKSONO, S.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDI SARWOAJI, AP, MH
Jabatan : Camat Watukumpul
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul

DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

ARIS YUGO SAKSONO, S.Pd

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN WATUKUMPUL
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tertindakannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2.00	1	0	1	0
2	Tertindakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	30.00	0	0	30	0
3	Tertindakannya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	30.00	0	0	30	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	2.331.000	575.000	669.000	1.425.000
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.000.000	1.235.000	1.125.000	6.515.000	4.125.000
3	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.140.000	1.625.000	490.000	1.625.000	400.000

Pihak Kedua,
Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



ARIS YUGO SAKSONO, S.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAN AMALIA, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SITI WAHYU NIKMAH, SE
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Watukumpul
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Watukumpul

SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

YAN AMALIA, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14.00	14	14	14	14
2	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4.00	1	1	1	1
3	Tertindakannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	25.00	7	5	6	7
4	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan yang Disediakan	paket	2.00	1	1	0	0
5	Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36.00	9	9	9	9
6	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	3	3	3	3
7	Tertindakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36.00	9	9	9	9
8	Tertindakannya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3
9	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3
10	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16.00	4	3	4	5
11	Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3.00	1	1	0	1
12	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3.00	0	1	2	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.994.292.000	424.688.745	566.251.660	566.251.660	437.099.935
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.650.000	1.883.400	1.126.600	970.000	670.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.528.000	11.725.000	8.104.850	10.425.000	6.273.150
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.033.000	1.750.000	1.750.000	883.000	650.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.648.000	10.525.000	8.827.000	11.622.000	12.674.000
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	1.000.000	1.460.000	2.310.000	1.230.000
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.130.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	6.380.000
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.150.000
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.560.000	33.390.000	33.390.000	33.390.000	33.390.000
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000	9.950.000	3.101.750	7.114.150	6.834.100
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.350.000	402.000	988.000	660.000	4.300.000
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000	0	4.995.000	4.995.000	0

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian


YAN AMALIA, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.**
Jabatan : **Plt. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SITI WAHYU NIKMAH, SE**
Jabatan : **Sekretaris Kecamatan Watukumpul**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan


NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2.00	1	1	0	0
2	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
3	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
4	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
5	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
6	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4.00	1	1	1	1
7	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	1	1	1	1
8	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	0	0	0	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.775.000	225.000	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0	750.000	1.250.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	907.000	1.093.000	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	0	0	2.000.000	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	0	300.000	1.700.000	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	700.000	585.000	715.000	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	1.022.000	850.000	478.000	150.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	600.000	0	0	1.400.000

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan


NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI, S.AP
Jabatan : Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SITI WAHYU NIKMAH, SE
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Watukumpul
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Watukumpul

SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 08 Desember 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

SRI WAHYUNI, S.AP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2.00	1	1	0	0
2	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
3	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
4	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
5	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0
6	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4.00	1	1	1	1
7	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	1	1	1	1
8	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	0	0	0	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.775.000	225.000	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0	750.000	1.250.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	907.000	1.093.000	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	0	0	2.000.000	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	0	300.000	1.700.000	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	700.000	585.000	715.000	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	1.022.000	850.000	478.000	150.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	600.000	0	0	1.400.000

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU/NIKMAH, SE

Pemalang, 08 Desember 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan


SRI WAHYUNI, S.AP.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN WATUKUMPUL

KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL

NOMOR : 050 / 59 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

CAMAT WATUKUMPUL

- Menimbang :**
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11115/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11115/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya, diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018-2038;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang Jaya;
16. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu pada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Watukumpul Kabupaten Pemalang;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watukumpul
pada tanggal : 30 Desember 2022

CAMAT WATUKUMPUL,


DEDI SARWOAJI, AP., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19741206 199311 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
Nomor : 050/ 59 / TAHUN 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**DATA TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN BERJALAN	KONDISI AKHIR
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	80	86	92
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	93,33	94,67	97,33

CAMAT WATUKUMPUL



DEDI SARWOAJI, AP., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19741206 199311 1 001

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 PADA
KECAMATAN WATUKUMPUL**

NOMOR : 700/025/EVS/VI/2023

TANGGAL : 16 JUNI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

Pemalang, 16 Juni 2023

Nomor : 700/25/EVS/MI/2023

Kepada Yth.

Lampiran : -

Camat Watukumpul

Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

di--

WATUKUMPUL

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

f) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/5/2023 tanggal 2 Januari tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

g) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/2/SPT.EV./2023 tanggal 6 April 2023.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "self assessment", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "self-assessment" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi

a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah

b) Tujuan Khusus :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab		Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si
2.	Supervisor		ADJI NUSWANTORO, S.Hut
3.	Ketua Tim		AGUS HASANI, S.IP.,MM.
4.	Anggota		NURSETIAWATI, S.Kep.NerS,M.H.Kes.
5.	Anggota		MINTARSIH, SE
6.	Anggota		SRI PANGASTUTI, SE
7.	Anggota		KUNENDAR, SE

1.7. Gambaran Umum Kecamatan Watukumpul

a) Dasar hukum pembentukan

Kecamatan Watukumpul dibentuk melalui:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Watukumpul.

b) Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan dan penegakkan perda dan peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

1.8. **Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kecamatan Watukumpul.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (**clean and good governance**) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kecamatan Watukumpul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (**good governance**) dan berorientasi hasil (**result oriented government**) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan, Kecamatan Watukumpul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 2 (dua) indikator.

Berdasarkan atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa capaian kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Watukumpul beserta target serta realisasi dan capaiannya dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	84	90,21	107,39
2.	Cakupan layanan kecamatan	94,67	90,89	93,38

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100,38 % termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Pencapaian tertinggi pada Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan yaitu mencapai 107,39% Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Kecamatan Watukumpul pada Tahun 2022.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 3 (tiga) rekomendasi dan sebagian sudah ditindaklanjuti.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya	Sudah ada Surat Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang tanggal 6 April 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023
2	Dokumen Perencanaan Kinerja hendaknya dipublikasikan tepat waktu dan dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja / aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), serta dapat menyajikan perbaikan / penyempurnaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya guna capaian kinerja yang lebih baik.	Belum dipublikasikan seluruhnya hanya Renstra tarhun 2021 - 2026.
3	Menetapkan Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur Indikator Kinerja. Setiap level Organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, dan Pengukuran	belum

	Kinerja hendaknya dapat berpengaruh pada Strategi, Kebijakan serta efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	
4	Dokumen Laporan Kinerja hendaknya telah direviu dan dipublikasikan (melalui Website Kecamatan terkait). Dokumen Laporan Kinerja hendaknya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan juga penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Belum dipublikasikan

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Watukumpul pada Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2022 mendapatkan Nilai 59,05 kategori **CUKUP** dengan Predikat **“CC”**. Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,2	6,3	10,5	21
Pengukuran Kinerja	30	3,6	5,4	7,5	16,5
Pelaporan Kinerja	15	1,8	2,25	3,75	7,8
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3	4,5	6,25	13,75
Total Nilai	100				59,05

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,65 yaitu dari 48,40 menjadi 59,05 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.1. Hasil Evaluasi

2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja sebagai berikut :

1. **Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.**
 - a. Telah ada Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, yaitu : Surat Kepala Bappeda Kabupaten Pematang Tanggar tanggal 6 April 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tanggar Tahun 2023.
 - b. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, yaitu : RPJPD tahun 2005 - 2025 Kabupaten Pematang Tanggar yang ditetapkan dengan Perda RPJPD Nomor 24 tahun 2008.
 - c. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu : Renstra tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Perbup Nomer 38 Tahun 2021. Dan IKU tahun 2021 -2026 yang ditetapkan dengan Perbup IKU Nomor 83 tahun 2021.
 - d. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek, yaitu : Renja 2023 yang ditetapkan dengan Perbup no 18 Tahun 2022 tgl 7 Juli 2022.
 - e. Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja, yaitu : Rencana Aksi sudah dibuat yang didalamnya sudah per Triwulan.
 - f. Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja, yaitu : sudah ada DPA dan RKA tahun 2023.
2. **Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja**
 - a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, antara lain Renstra tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan dengan Perbup Nomer 38 Tahun 2021, Renja 2023 telah ditetapkan dengan Perbup no 18 Tahun 2022, RKA/DPA tahun 2023, Rencana Aksi dan PK tahun 2023 sudah ada dan telah ditetapkan.
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.
 - c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, Arah kebijakan pada BAB V Renstra selaras dengan permasalahan dan isu strategis pada BAB III Renstra.
 - d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, Rumusan Tujuan/Sasaran pada BAB IV Renstra telah selaras dengan strategi dan arah kebijakan BAB V Renstra.

- e. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, yaitu dapat diukur, dapat diidentifikasi, dapat dicapai, relevan, terkait langsung dan ada batasan waktu.
 - f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable- tidak sering diganti dalam 1 periode strategi),yaitu ketidakselarasan data sasaran dan target pada Renstra.
 - g. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (Achievable) menantang dan realistis, ada tantangan dan realistis.
 - h. Setiap Dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading) sudah sesuai.
 - i. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas anatar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)
 - j. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, sudah ada PK Eselon
 - k. Setiap Pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, setiap pegawai telah membuat SKP.
3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.
- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, DPA dan RKA telah memuat indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, target kinerja dalam PK telah dijabarkan secara periodic.
 - c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik karena ada realisasi/pelaksanaan rencana aksi pertriwulan berupa dokumen capaian kinerja internal.
 - d. Rencana Aksi Kinerja dapat berjalan dinamis karena Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
 - e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, karena monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala sehingga ada upaya perbaikan atas kinerja triwulan sebelumnya.

- f. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik, karena monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan secara berkala sehingga dapat dianalisa menunjukkan hasil yang lebih baik dari triwulan sebelumnya.
- g. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan karena tiap Kasubag melaksanakan monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja yang menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja dan menyusun rencana aksi setiap triwulan pada tahun berjalan.
- h. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; karena telah merencanakan, mengukur/menghitung dan menginput capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja secara berkala/setiap bulan.

2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja
 - a. Belum ada Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja, hanya ada SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
 - b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang disahkan oleh Camat Watukumpul yaitu Keputusan Nomor : 050/50/Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama
 - c. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP), yaitu Keputusan Camat Watukumpul Nomor : 03/sekretariat tentang SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja
 - a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, hal ini dinilai dari dokumen pelaksanaan Monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja dan Laporan Hasil

monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta Rencana Aksi yang ditandatangani oleh Pimpinan.

- b. Data kinerja yang dikumpulkan sudah sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, ada data realisasi fisik, keuangan bulanan/triwulan dan Data kinerja.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan ada data capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan.
- d. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja tiap triwulan belum ada.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang melalui aplikasi <https://esr.menpan.go.id>
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi esr
- g. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan; dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pematang, yang menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai variabel indikator pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan.
- b. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional karena belum di buat peraturan, yang menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai variabel indikator dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- c. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi yaitu ; belum ada evaluasi SOTK atas dasar hasil pengukuran kinerja.
- d. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja ; yaitu telah dilakukan reviu dan perubahan atas Renstra.

- e. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja ; yaitu belum ada kebijakan tertulis yang diputuskan atas dasar hasil pengukuran kinerja
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja ; yaitu telah ada rencana aksi sebagai penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja pada tahun berjalan.
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja ; yaitu Adanya perubahan anggaran pada RKA tahun berjalan.
- h. Sudah ada hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang menganalisa/memuat perhitungan efisiensi anggaran atas capaian kinerja setiap triwulan.
- i. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja ; karena adanya hasil monitoring capaian kinerja dan rencana aksi pada setiap Kasubag.
- j. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; karena Pegawai telah merencanakan, mengukur/menghitung dan memperbaiki target kinerja berikutnya, serta menginput capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja secara berkala/setiap bulan.

2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen Laporan Kinerja yaitu LKJIP tahun 2022 telah disusun.
 - b. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala per triwulan.
 - c. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu ditandatangani Camat.
 - d. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu oleh Bagian Organisasi.
 - e. Dokumen Laporan Kinerja OPD belum dipublikasikan yaitu melalui Website; <https://watukumpul.pemalangkab.go.id>
 - f. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 telah disampaikan tepat waktu ; yaitu bulan 10 Maret 2023.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar ; yaitu pedoman penyusunan LKjIP (Permendagri 53/2014).
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; yaitu LKjIP pada BAB III telah memuat target, realisasi dan capaian kinerja.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan ; yaitu LKjIP pada BAB III telah memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu LKjIP BAB III memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam periode Renstra.
- e. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP pada BAB III) telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- f. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja); yaitu Dokumen LKjIP pada BAB III belum Memuat perbandingan realisasi kinerja antar kabupaten se-indonesia.
- g. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP BAB III) sudah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- h. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP BAB III) menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- i. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP BAB III) sudah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), dibuktikan Telah ada pernyataan pertanggungjawaban pimpinan atas muatan materi dalam LKjIP pada lampiran.

- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, yaitu belum ada bukti dilaksanakannya rapat tentang pembahasan LKJIP (Undangan Rapat, Bukti Hadir dan Notulen)
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja ; yaitu LKJIP telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dalam Renja tahun berikutnya.
- d. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja ; yaitu LKJIP belum digunakan dalam penyesuaian penyusunan anggaran (DPA/RKA) tahun berikutnya.
- e. Informasi dalam laporan kinerja sudah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja ; yaitu Telah di sajikan tingkat capaian kinerja pada Bab III LKJIP berupa analisis capaian kinerja.
- f. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya ; yaitu LKJIP belum digunakan penyesuaian perencanaan kinerja dalam Renja tahun berikutnya.
- g. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi ; yaitu LKJIP belum mempengaruhi budaya kinerja organisasi ke arah yang lebih baik.

2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Belum disusun Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Pemda Kabupaten Pematang; sesuai standar, saat ini menggunakan Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2021.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Inspektorat Kabupaten Pematang telah dilaksanakan oleh APIP ; yaitu terbitnya LHE No : 700/21/EVS/2022 tanggal 20 Juli 2022
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang ; yaitu Penilaian AKIP pada tingkat OPD dilaksanakan Oleh APIP (nilai SAKIP

Kecamatan Watukumpul tahun 2022 = 48,40), kemudian pada tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kemenpan-RB. (nilai SAKIP = 68,93)

2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar; yaitu sesuai Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2021.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai; yaitu Evaluasi dilakukan oleh evaluator yang telah mendapatkan Pelatihan Kantor Sendiri dengan Narasumber yang telah bersertifikat Diklat SAKIP.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai ; yaitu dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif dan Teknik evaluasi ; checklist dokumen, tanya jawab dan observasi.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), masih menggunakan Kertas Kerja Evaluasi AKIP.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

- a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
- b. sudah ada peningkatan Implementasi SAKIP karena rekomendasi untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja yang menghasilkan rencana aksi sudah ditindaklanjuti.
- c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- d. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. sudah terlihat perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2.2. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Kecamatan Watukumpul, Evaluatur merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

1. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja di <https://watukumpul.pemalangkab.go.id>
2. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang antaranya memuat;
 - 1) Tata Cara Pengumpulan Data Kinerja.
 - 2) Tata cara Pengukuran Capaian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
 - 1) Capaian Kinerja, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pejabat eselon. Hasil kerjanya adalah ;
 - a) Data capaian Kinerja eselon, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja Individu sesuai bidang tugasnya.
 - b) Mengisi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja sesuai bidang tugasnya.
 - 2) Capaian Kinerja OPD, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang di tandatangi Pimpinan OPD. Hasil Kerja adalah;
 - a) Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Pertriwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.
 - b) Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja OPD pertriwulan berikutnya, yang disusun berdasarkan masalah/hambatan dalam upaya capaian kinerja OPD.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara berkala dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang menghasilkan ;
 - 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Tahun 2023 OPD.
 - 2) Rencana Aksi OPD atas evaluasi capaian Kinerja triwulan 1,2,3 dan 4 Tahun 2023 yang dirangkum dari Rencana Aksi Perbidang.

- 3) Memformalkan Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja internal dan Rencana Aksi OPD.
5. Melakukan rapat pembahasan LKJIP Tahun 2022 yang menghasilkan Rencana Aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023)

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Camat Watukumpul memperoleh nilai 59,05 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21
b.	Pengukuran Kinerja	30	16,5
c.	Pelaporan Kinerja	15	7,8
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	59,05

3.1.2. Kategori Penilaian


Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 59,05 Camat Watukumpul termasuk dalam kategori penilaian " CUKUP " (CC) dengan interpretasi Tatanan dalam AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat

dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP diinstansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi /instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Kecamatan Watukumpul.

Pemalang, 16 Juni 2023
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

Perangkat Daerah : Kecamatan Watukumpul

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
1.	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja di https://watukumpul.pemalangkab.go.id	Ditindaklanjuti dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan dokumen laporan kinerja pada web Kecamatan Watukumpul	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	Selesai
2.	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang antaranya memuat: 1. Tata cara pengumpulan data kinerja 2. Tata cara pengukuran capaian kinerja	Ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja beserta tata caranya	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	Selesai
3.	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 1. Capaian Kinerja, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pejabat eselon. Hasil kerjanya adalah: a. Data capaian kinerja eselon, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja individu sesuai bidang tugasnya. b. Mengisi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja sesuai bidang tugasnya. 2. Capaian Kinerja OPD, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pimpinan OPD. Hasil Kerja adalah: a. Memuat laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja OPD per triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.	1. Data laporan capaian kinerja per triwulan dirangkum dari hasil kerja individu sesuai bidang tugasnya dengan pedoman dokumen Perjanjian Kinerja, renja 2023 dan rencana aksi. 2. Terkait masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sudah tertuang pada dokumen evaluasi RKPD 3. Laporan capaian kinerja OPD per triwulan disusun sesuai dengan rencana aksi 2023 yang telah dibuat. 4. Penyusunan rencana aksi pada triwulan selanjutnya akan memperhatikan masalah/hambatan guna Upaya capaian kinerja OPD yang maksimal	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	Selesai

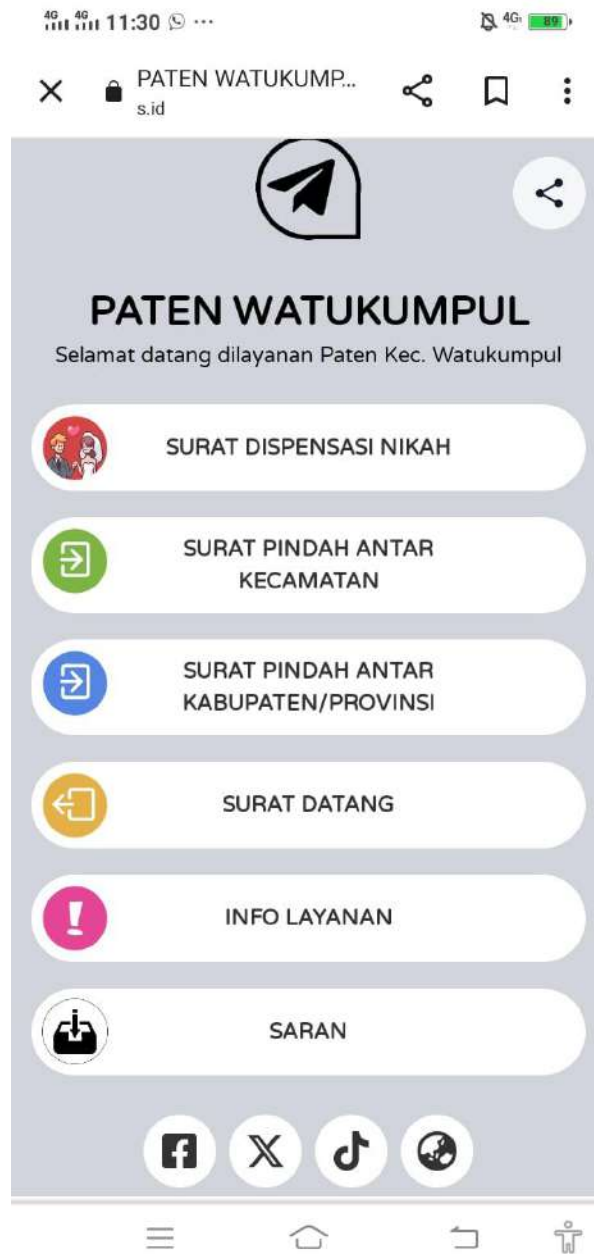
	b. Dokumen rencana aksi capaian kinerja OPD pertriwulan berikutnya, yang disusun berdasarkan masalah/hambatan dalam upaya capaian kinerja OPD.			
4.	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dengan menggunakan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang menghasilkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan 1,2,3 dan 4 tahun 2023 OPD 2. Rencana aksi OPD atas evaluasi capaian kinerja triwulan 1,2,3 dan 4 tahun 2023 yang dirangkum dari rencana aksi perbidang. 3. Memformalkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal dan rencana aksi OPD 	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I dan II Tahun 2023 sudah dilakukan dalam bentuk dokumen evaluasi RKPD Tahun 2023 b. Capaian kinerja perbidang maupun OPD di rangkum dan dievaluasi untuk merencanakan rencana aksi pada bulan berikutnya. c. Memformalkan dokumen Evaluasi RKPD triwulan I, II dan dokumen rencana aksi dengan ditandatangani oleh Camat Watukumpul 	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	Selesai
5.	Melakukan rapat pembahasan LKjIP tahun 2022 yang menghasilkan rencana aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023)	Rapat koordinasi	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	Selesai

Pematang, Agustus 2023
CAMAT WATUKUMPUL



DEDI SARWOAJI, AP., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19741206 199311 1 001

INOVASI



MISI KFNDA	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih																																																																																																																																																																									
TUJUAN DAERAH IK	Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)																																																																																																																																																																									
SASARAN DAERAH IK	Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan publik Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat																																																																																																																																																																									
TUJUAN OPD IK DO	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan (IKM) Hasil survei kepuasan masyarakat																																																																																																																																																																									
SASARAN OPD IK DO	Meningkatkan pelayanan kecamatan Cakupan layanan kecamatan (SLA) Rata-rata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan Kelurahan yang aktif, persentase anasir transkribasi tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase desa berata kelola pemerintahan baik																																																																																																																																																																									
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																																																																																																																																																										
IK Program	SAKIP							IRB			Persentase pelayanan publik yang tersedia (%)		Persentase masyarakat desa dan Kelurahan yang aktif (%)		Persentase gangguan transkribasi tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (%)		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (%)	Persentase desa berata kelola pemerintahan baik (%)																																																																																																																																																								
DO	Penilaian dari tim Asesor OPD							Penilaian dari tim Asesor OPD			Rerata dari persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun, persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun, persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun		Rerata dari persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum yang tersusun, persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun		Rerata dari persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum sesuai peraturan kepala daerah yang tersusun	Rerata dari persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum sesuai peraturan kepala daerah yang tersusun																																																																																																																																																										
KEGIATAN	<table border="1"> <tr> <td>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td> <td>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> <td>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</td> <td>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</td> <td>Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> <td>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td> <td>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td> <td>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td> <td>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td> <td>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</td> <td>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</td> <td>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</td> <td>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum</td> <td>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</td> <td>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Peraturan Kepala Daerah</td> <td>Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</td> </tr> <tr> <td>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (laporan)</td> <td>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia (unit)</td> <td>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun (laporan)</td> <td>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit)</td> <td>Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum yang tersusun (laporan)</td> <td>Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun (laporan)</td> <td>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai peraturan kepala daerah yang tersusun (dokumen)</td> <td>Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (dokumen)</td> </tr> <tr> <td>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)</td> <td>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akurat (%)</td> <td>Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%)</td> <td>Persentase jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun (%)</td> <td>Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun (%)</td> <td>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia (%)</td> <td>Persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun (%)</td> <td>Persentase ketersediaan barang milik daerah yang siap dipelihara (%)</td> <td>Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (%)</td> <td>Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun (%)</td> <td>Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun (%)</td> <td>Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun (%)</td> <td>Persentase laporan koordinasi ketertamanan dan ketertiban umum yang tersusun (%)</td> <td>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun (%)</td> <td>Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai peraturan kepala daerah yang tersusun (%)</td> <td>Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (%)</td> </tr> </table>														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Peraturan Kepala Daerah	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (laporan)	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia (unit)	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun (laporan)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit)	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun (dokumen)	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum yang tersusun (laporan)	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun (laporan)	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai peraturan kepala daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (dokumen)	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akurat (%)	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%)	Persentase jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun (%)	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun (%)	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia (%)	Persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun (%)	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang siap dipelihara (%)	Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (%)	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun (%)	Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun (%)	Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun (%)	Persentase laporan koordinasi ketertamanan dan ketertiban umum yang tersusun (%)	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun (%)	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai peraturan kepala daerah yang tersusun (%)	Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (%)																																																																																																												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Peraturan Kepala Daerah	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																																																																																																																																																											
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (laporan)	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia (unit)	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun (laporan)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit)	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun (dokumen)	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum yang tersusun (laporan)	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun (laporan)	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai peraturan kepala daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (dokumen)																																																																																																																																																											
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akurat (%)	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%)	Persentase jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun (%)	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun (%)	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia (%)	Persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun (%)	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang siap dipelihara (%)	Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (%)	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun (%)	Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun (%)	Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun (%)	Persentase laporan koordinasi ketertamanan dan ketertiban umum yang tersusun (%)	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun (%)	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai peraturan kepala daerah yang tersusun (%)	Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (%)																																																																																																																																																											
SUB KEGIATAN	<table border="1"> <tr> <td>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</td> <td>Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</td> <td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td> <td>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</td> <td>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</td> <td>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td> <td>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</td> <td>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</td> <td>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</td> <td>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td> <td>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</td> <td>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</td> <td>Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</td> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</td> <td>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)</td> <td>Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)</td> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</td> <td>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)</td> <td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</td> <td>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen)</td> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (dokumen)</td> <td>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (dokumen)</td> <td>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga masyarakat)</td> <td>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)</td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)</td> <td>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)</td> </tr> <tr> <td>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</td> <td>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</td> <td>Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</td> <td>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</td> <td>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> <td>Pengadaan Mebel</td> <td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td> <td>Pemeliharaan Mebel</td> <td>Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</td> <td>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</td> <td>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</td> <td>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</td> <td>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td> <td>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</td> <td>Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</td> <td>Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</td> <td>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)</td> <td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)</td> <td>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</td> <td>Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Fasilitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)</td> <td>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)</td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)</td> <td>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)</td> </tr> <tr> <td>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td> <td>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</td> <td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td> <td>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> <td>Pengadaan Peralatan dan Mebel Lainnya</td> <td>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> <td>Pemeliharaan Peralatan dan Mebel Lainnya</td> <td>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</td> <td>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</td> <td>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td> <td>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</td> <td>Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</td> <td>Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)</td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)</td> <td>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</td> <td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)</td> <td>Jumlah Unit Peralatan dan Mebel Lainnya yang Disediakan (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)</td> <td>Jumlah Peralatan dan Mebel Lainnya yang Dipelihara (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)</td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)</td> <td>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)</td> </tr> <tr> <td>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td> <td>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</td> <td>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</td> <td>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> <td>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> <td>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> <td>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</td> <td>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</td> <td>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</td> <td>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td> <td>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</td> <td>Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</td> <td>Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</td> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (paket)</td> <td>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)</td> <td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)</td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)</td> <td>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)</td> </tr> <tr> <td>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td> <td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td> <td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td> <td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td> <td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td> <td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td> <td>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</td> <td>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</td> <td>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</td> <td>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td> <td>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</td> <td>Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</td> <td>Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</td> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (paket)</td> <td>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)</td> <td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)</td> <td>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)</td> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)</td> <td>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)</td> </tr> </table>														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (dokumen)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (dokumen)	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga masyarakat)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Mebel	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	Jumlah Laporan Fasilitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mebel Lainnya	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mebel Lainnya	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Unit Peralatan dan Mebel Lainnya yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Peralatan dan Mebel Lainnya yang Dipelihara (unit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (paket)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (paket)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																																																																																																																																																											
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (dokumen)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (dokumen)	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga masyarakat)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)																																																																																																																																																											
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Mebel	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																																																																																																																																																											
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	Jumlah Laporan Fasilitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)																																																																																																																																																												
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mebel Lainnya	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mebel Lainnya	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																																																																																																																																																											
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Unit Peralatan dan Mebel Lainnya yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Peralatan dan Mebel Lainnya yang Dipelihara (unit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)																																																																																																																																																												
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																																																																																																																																																											
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (paket)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)																																																																																																																																																												
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																																																																																																																																																											
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (paket)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)																																																																																																																																																												

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)

Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (dokumen)

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (dokumen)

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (dokumen)

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (dokumen)


Indikator Kinerja Utama :

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan I	Capaian Hingga Triwulan I (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	-	86	-	86	0	0,00	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Cakupan Layanan Kecamatan	%	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67	100,00	-	-

No	Program	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan I (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.295.769.500,00	505.911.145,00	639.411.860,00	651.906.810,00	498.539.685,00	455.991.751,00	19,86
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.000.000,00	7.957.000,00	8.956.000,00	5.585.000,00	3.502.000,00	0,00	0,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.000.000,00	52.718.000,00	6.700.000,00	6.582.000,00	0,00	35.275.000,00	53,45
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	2.331.000,00	575.000,00	669.000,00	1.425.000,00	2.331.000,00	46,62
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.140.000,00	3.485.000,00	7.690.000,00	10.740.000,00	2.225.000,00	2.760.000,00	11,43
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.511.500,00	24.761.500,00	35.682.000,00	31.156.000,00	8.912.000,00	15.882.500,00	15,80

Pemalang, 10 April 2023
CAMAT WATUKUMPUL



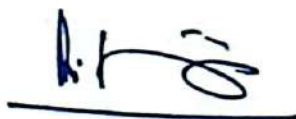
DEDI SARWOAJI, AP, MH

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
SEKRETARIAT PADA KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan I	Capaian Hingga Triwulan I (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14	3	3	6	2	3	21,43	-	-
2.1	Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Laporan	1	0	0	0	1	0	0,00	-	-
3.1	Tertindakannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yan tersedia	Layanan	4	4	4	4	4	3	18,75	-	-
4.1	Tertindakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	4	4	4	4	4	4	25,00	-	-
5.1	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	22	5	5	6	6	3	13,64	-	-

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan I (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000,00	3.497.000,00	2.867.000,00	6.736.000,00	1.400.000,00	1.335.940,00	9,21
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.983.880.500,00	425.288.745,00	566.251.660,00	566.251.660,00	426.088.435,00	423.082.811,00	21,33
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.839.000,00	25.883.400,00	19.808.450,00	23.900.000,00	19.247.150,00	6.000.500,00	6,75
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.560.000,00	40.890.000,00	41.400.000,00	42.250.000,00	41.020.000,00	24.316.000,00	14,69
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.990.000,00	10.352.000,00	9.084.750,00	12.769.150,00	10.784.100,00	1.256.500,00	2,92

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 April 2023
SEKRETARIS KECAMATAN WATUKUMPUL



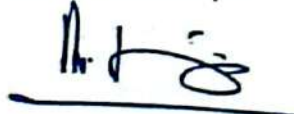
SITI WAHYU NIKMAH, SE

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
SEKSI PELAYANAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan I	Capaian Hingga Triwulan I (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	10.00	5	4	1	0	3	30,00	-	-
1.2	Tertindakannya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6.00	1	2	1	2	1	16,67	-	-
1.3	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	3	0	2	0	1	20,00	-	-
2.1	Tertindakannya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	100.00	35	15	35	15	183	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan I (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan I(%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000,00	2.904.000,00	2.400.000,00	558.000,00	138.000,00	0,00	0,00
1.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	135.000,00	2.375.000,00	120.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00
1.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	2.370.000,00	125.000,00	2.375.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000,00	890.000,00	2.760.000,00	882.000,00	468.000,00	0,00	0,00

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 April 2023
PLT. KEPALA SEKSI PELAYANAN



SITI WAHYU NIKMAH, SE

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan I	Capaian Hingga Triwulan I (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1.00	1	0	0	0	1	100,00	-	-
1.2	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	2	2	1	0	0	0,00	-	-
2.1	Tertindakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15.00	3	6	6	0	3	20,00	-	-
2.2	Tertindakannya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	15.00	6	6	3	0	4	26,67	-	-
2.3	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15.00	0	0	7	8	0	0,00	-	-
2.4	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1.00	1	0	0	0	0	0,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan I (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Sinkronisasi ProgramKerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.275.000,00	76,68
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	6.718.000,00	6.700.000,00	6.582.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000,00	6.750.000,00	15.250.000,00	13.000.000,00	0,00	6.750.000,00	19,29
2.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.410.000,00	4.866.000,00	4.544.000,00	1.000.000,00	0,00	1.900.000,00	18,25
2.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.500.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
2.4	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.655.000,00	2.763.000,00	1.650.000,00	2.442.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 April 2023
 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA



NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan I	Capaian Hingga Triwulan I (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2.00	1	0	1	0	1	50,00	-	-
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	30.00	0	0	30	0	6	20,00	-	-
2.2	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	30.00	0	0	30	0	0	0,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan I (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	2.331.000,00	575.000,00	669.000,00	1.425.000,00	2.331.000,00	46,62
2.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000,00	1.235.000,00	1.125.000,00	6.515.000,00	1.125.000,00	2.360.000,00	23,60
2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.140.000,00	1.625.000,00	490.000,00	1.625.000,00	400.000,00	400.000,00	9,66

Camat Watukumpul



 DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 April 2023
 KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 UMUM



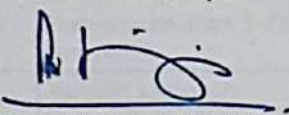
 ARIS YUGO SAKSONO, S.PD

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

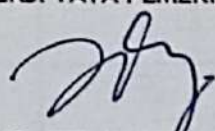
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan I	Capaian Hingga Triwulan I (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5.00	3	1	1	0	0	0,00	-	-
2.1	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2.00	0	2	0	0	0	0,00	-	-
3.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	15.00	15	0	0	0	8	53,33	-	-
3.2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15.00	5	7	0	3	5	33,33	-	-
3.3	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	15.00	0	5	10	0	0	0,00	-	-
3.4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	15.00	7	3	5	0	3	20,00	-	-
3.5	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4.00	0	4	0	0	0	0,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan I (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	1.658.000,00	1.296.000,00	1.650.000,00	396.000,00	0,00	0,00
2.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	625.000,00	6.075.000,00	2.600.000,00	700.000,00	0,00	0,00
3.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.839.500,00	3.202.500,00	0,00	2.475.000,00	1.162.000,00	3.202.500,00	46,82
3.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.482.000,00	3.288.000,00	4.494.000,00	0,00	2.700.000,00	3.288.000,00	31,37
3.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000,00	0,00	3.611.000,00	6.389.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.625.000,00	3.892.000,00	1.133.000,00	3.600.000,00	0,00	742.000,00	8,60
3.5	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camat Watukumpul


DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 April 2023
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN


IR. SITI KHOPSAH

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan I	Capaian Hingga Triwulan I (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14.00	14	14	14	14	14	25,00	-	-
2.1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4.00	1	1	1	1	1	25,00	-	-
2.2	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	25.00	7	5	6	7	5	20,00	-	-
2.3	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2.00	1	1	0	0	0	0,00	-	-
2.4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36.00	9	9	9	9	7	19,44	-	-
3.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	25,00	-	-
3.2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36.00	9	9	9	9	9	25,00	-	-
3.3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	25,00	-	-

3.4	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3	2	16,67	-	-
4.1	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16.00	4	3	4	5	2	12,50	-	-
4.2	Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3.00	1	1	0	1	1	33,33	-	-
4.3	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3.00	0	1	2	0	0	0,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan I (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.981.880.500,00	424.688.745,00	566.251.660,00	566.251.660,00	424.688.435,00	422.482.811,00	21,32
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	1.883.400,00	1.126.600,00	970.000,00	1.020.000,00	1.139.000,00	22,78
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.530.000,00	11.725.000,00	8.104.850,00	10.425.000,00	9.275.150,00	4.634.500,00	11,72
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.383.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.926.000,00	10.525.000,00	8.827.000,00	11.622.000,00	8.952.000,00	227.000,00	0,57
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	1.000.000,00	1.460.000,00	2.310.000,00	1.230.000,00	130.000,00	2,17
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	1.687.100,00	8,03
3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.150.000,00	498.900,00	9,98
3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.560.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	22.000.000,00	16,47
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	9.950.000,00	3.101.750,00	7.114.150,00	9.834.100,00	166.500,00	0,56
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	402.000,00	988.000,00	660.000,00	950.000,00	1.090.000,00	36,33
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00

Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 10 April 2023
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


YAN AMALIA, SE

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan I	Capaian Hingga Triwulan I (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2.00	1	1	0	0	1	50,00	-	-
1.2	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	-	-
1.3	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	-	-
1.4	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	-	-
1.5	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	-	-
1.6	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4.00	1	1	1	1	1	25,00	-	-

1.7	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	1	1	1	1	1	25,00	-	-
2.1	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	0	0	0	1	0	0,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan I (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.775.000,00	225.000,00	0,00	0,00	1.048.940,00	52,45
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	0,00	907.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	700.000,00	585.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.022.000,00	850.000,00	478.000,00	150.000,00	287.000,00	11,48
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00	30,00

Sekretaris Kecamatan Watukumpul



SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 10 April 2023
 PLT. KEPALA SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN
 KEUANGAN



NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	-	86	-	86	90,45	100,00	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Cakupan Layanan Kecamatan	%	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67	100,00	-	-

No	Program	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan II (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.295.769.500,00	505.911.145,00	639.411.860,00	651.906.810,00	498.539.685,00	519.192.211,00	42,48
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.000.000,00	7.957.000,00	8.956.000,00	5.585.000,00	3.502.000,00	13.243.335,00	50,94
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.000.000,00	52.718.000,00	6.700.000,00	6.582.000,00	0,00	13.346.000,00	73,67
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	2.331.000,00	575.000,00	669.000,00	1.425.000,00	0,00	46,62
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.140.000,00	3.485.000,00	7.690.000,00	10.740.000,00	2.225.000,00	3.775.000,00	27,07
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.511.500,00	24.761.500,00	35.682.000,00	31.156.000,00	8.912.000,00	27.988.000,00	43,65

Pemalang, 10 Juli 2023
CAMAT WATUKUMPUL


DEDI SARWOAJI, AP, MH

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SEKRETARIAT PADA KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14	3	3	6	2	2	35,71	-	-
2.1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Laporan	1	0	0	0	1	0	0,00	-	-
3.1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	4	4	4	4	4	4	43,75	-	-
4.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	4	4	4	4	4	4	50,00	-	-
5.1	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	22	5	5	6	6	1	18,18	-	-

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SEKRETARIAT PADA KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14	3	3	6	2	2	35,71	Deadline pekerjaan tinggi	Meminta kelonggaran waktu kepada OPD terkait
2.1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Laporan	1	0	0	0	1	0	0,00	Rencana pelaksanaan pada Triwulan IV	Dilaksanakan pada Triwulan IV
3.1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	4	4	4	4	4	4	43,75	Tidak ada masalah	-
4.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	4	4	4	4	4	4	50,00	Tidak ada masalah	-
5.1	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	22	5	5	6	6	1	18,18	Pekerjaan terhambat karena kendaraan (mobi, motor) rusak/mogok	Melakukan pengecekan kendaraan sebelum digunakan

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan II (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000,00	3.497.000,00	2.867.000,00	6.736.000,00	1.400.000,00	3.057.000,00	30,30
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.983.880.500,00	425.288.745,00	566.251.660,00	566.251.660,00	426.088.435,00	452.972.290,00	44,16
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.839.000,00	25.883.400,00	19.808.450,00	23.900.000,00	19.247.150,00	17.604.500,00	26,57
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.560.000,00	40.890.000,00	41.400.000,00	42.250.000,00	41.020.000,00	45.009.421,00	41,87
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.990.000,00	10.352.000,00	9.084.750,00	12.769.150,00	10.784.100,00	549.000,00	4,20

Camat Watukumpul



 DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Juli 2023
 SEKRETARIS KECAMATAN WATUKUMPUL


 SITI WAHYU NIKMAH, SE

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SEKSI PELAYANAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	10.00	5	4	1	0	1	40,00	Tidak ada masalah	-
1.2	Tertindakannya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6.00	1	2	1	2	1	33,33	Tidak ada masalah	-
1.3	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	3	0	2	0	0	20,00	Masih harus evaluasi SOP yang sudah ada	Mempercepat pelayanan sesuai SOP yang ada
2.1	Tertindakannya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	100.00	35	15	35	15	198	100,00	Tidak ada masalah	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan II (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000,00	2.904.000,00	2.400.000,00	558.000,00	138.000,00	2.354.855,00	39,25
1.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	135.000,00	2.375.000,00	120.000,00	2.370.000,00	2.389.780,00	47,80
1.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	2.370.000,00	125.000,00	2.375.000,00	130.000,00	2.369.700,00	47,39
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000,00	890.000,00	2.760.000,00	882.000,00	468.000,00	3.175.000,00	63,50

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Juli 2023
PLT. KEPALA SEKSI PELAYANAN



SITI WAHYU NIKMAH, SE

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1.00	1	0	0	0	0	100,00	Usulan hasil kegiatan musrenbang kecamatan belum seluruhnya dapat terealisasi	Koordinasi dengan OPD pemangku kegiatan
1.2	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	2	2	1	0	2	40,00	Tidak ada masalah	-
2.1	Tertindakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15.00	3	6	6	0	1	26,67	Belum tertibnya administrasi	Fasilitasi pembinaan administrasi
2.2	Tertindakannya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	15.00	6	6	3	0	2	40,00	Tidak ada masalah	-
2.3	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15.00	0	0	7	8	0	0,00	Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes	Mengkoordinasikan dengan desa/kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
2.4	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1.00	1	0	0	0	1	100,00	Tidak ada masalah	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan II (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	6.718.000,00	6.700.000,00	6.582.000,00	0,00	13.346.000,00	66,73
2.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000,00	6.750.000,00	15.250.000,00	13.000.000,00	0,00	10.740.000,00	49,97
2.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.410.000,00	4.866.000,00	4.544.000,00	1.000.000,00	0,00	4.766.000,00	64,03
2.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.500.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
2.4	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.655.000,00	2.763.000,00	1.650.000,00	2.442.000,00	1.800.000,00	3.413.000,00	39,43

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Juli 2023
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA



NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2.00	1	0	1	0	0	50,00	Tidak ada masalah	-
2.1	Tertindakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	30.00	0	0	30	0	0	20,00	Partisipasi masyarakat dalam merayakan peringatan hari jadi dan HUT RI terbatas	Melakukan koordinasi dengan desa/kelurahan
2.2	Tertindakannya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	30.00	0	0	30	0	0	0,00	Belum maksimalnya pembinaan wawasan kebangsaan	Melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan II (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	2.331.000,00	575.000,00	669.000,00	1.425.000,00	0,00	46,62
2.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000,00	1.235.000,00	1.125.000,00	6.515.000,00	1.125.000,00	0,00	23,60
2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.140.000,00	1.625.000,00	490.000,00	1.625.000,00	400.000,00	0,00	9,66

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Juli 2023
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM



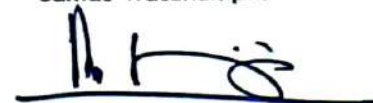
ARIS YUGO SAKSONO, S.PD

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5.00	3	1	1	0	2	40,00	Tidak ada masalah	-
2.1	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2.00	0	2	0	0	1	50,00	Tidak ada masalah	-
3.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	15.00	15	0	0	0	2	66,67	Tidak ada masalah	-
3.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15.00	5	7	0	3	1	40,00	Tidak ada masalah	-
3.3	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	15.00	0	5	10	0	2	13,33	Belum terdapat perubahan yang signifikan setelah dilakukan peningkatan kapasitas bagi kepala desa dan perangkat desa	Melakukan monitoring ke desa agar kinerja berjalan sesuai dengan tupoksi
3.4	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	15.00	7	3	5	0	1	26,67	Tidak ada masalah	-
3.5	Tertaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4.00	0	4	0	0	0	0,00	Belum masuk perodesasi	Menunggu SK Bupati

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan II (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	1.658.000,00	1.296.000,00	1.650.000,00	396.000,00	2.954.000,00	59,08
2.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	625.000,00	6.075.000,00	2.600.000,00	700.000,00	3.775.000,00	37,75
3.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.839.500,00	3.202.500,00	0,00	2.475.000,00	1.162.000,00	0,00	46,82
3.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.482.000,00	3.288.000,00	4.494.000,00	0,00	2.700.000,00	2.844.000,00	58,50
3.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000,00	0,00	3.611.000,00	6.389.000,00	0,00	3.225.000,00	32,25
3.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.625.000,00	3.892.000,00	1.133.000,00	3.600.000,00	0,00	1.500.000,00	25,99
3.5	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	30,00

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Juli 2023
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN



IR. SITI KHOPSAH

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertelaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2.00	1	1	0	0	0	50,00	Tidak ada masalah	-
1.2	Tertelaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	Deadline pekerjaan tinggi	Meminta kelonggaran waktu kepada OPD terkait
1.3	Tertelaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	Deadline pekerjaan tinggi	Meminta kelonggaran waktu kepada OPD terkait
1.4	Tertelaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	Deadline pekerjaan tinggi	Meminta kelonggaran waktu kepada OPD terkait
1.5	Tertelaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	Deadline pekerjaan tinggi	Meminta kelonggaran waktu kepada OPD terkait
1.6	Tertelaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4.00	1	1	1	1	1	50,00	Tidak ada Masalah	-

1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	1	1	1	1	1	50,00	Tidak ada Masalah	-
2.1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	0	0	0	1	0	0,00	Deadline pekerjaan tinggi	Penambahan SDM/pembentukan Tim

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan II (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.775.000,00	225.000,00	0,00	0,00	849.000,00	94,90
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	0,00	907.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	700.000,00	585.000,00	715.000,00	0,00	625.000,00	31,25
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.022.000,00	850.000,00	478.000,00	150.000,00	1.583.000,00	74,80
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	30,00

Sekretaris Kecamatan Watukumpul



SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 10 Juli 2023
 PLT. KEPALA SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN
 KEUANGAN



NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan II	Capaian Hingga Triwulan II (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14.00	14	14	14	14	14	50,00	Tidak ada masalah	-
2.1	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4.00	1	1	1	1	1	50,00	Tidak ada masalah	-
2.2	Tertindakannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	25.00	7	5	6	7	3	32,00	Tidak ada masalah	-
2.3	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2.00	1	1	0	0	0	0,00	Tersedianya stok kendali masuk dan keluar	Memfaatkan stok kendali masuk dan keluar yang ada
2.4	Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36.00	9	9	9	9	5	33,33	Ada undangan/acara lain yang bersamaan waktu pelaksanaannya	Pencermatan penjadwalan kegiatan
3.1	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	50,00	Tidak ada masalah	-
3.2	Tertindakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36.00	9	9	9	9	9	50,00	Tidak ada masalah	-
3.3	Tertindakannya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	50,00	Tidak ada masalah	-

3.4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3	2	33,33	Tidak ada masalah	-
4.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16.00	4	3	4	5	1	18,75	Pekerjaan terhambat karena kendaraan (mobi,motor) rusak/mogok	Melakukan pengecekan kendaraan sebelum digunakan
4.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3.00	1	1	0	1	0	33,33	Tidak ada masalah	-
4.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	3.00	0	1	2	0	0	0,00	Rencana pelaksanaan pada Triwulan III	Dilaksanakan pada Triwulan III

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan II (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.981.880.500,00	424.688.745,00	566.251.660,00	566.251.660,00	424.688.435,00	452.972.290,00	44,17
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	1.883.400,00	1.126.600,00	970.000,00	1.020.000,00	515.000,00	33,08
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.530.000,00	11.725.000,00	8.104.850,00	10.425.000,00	9.275.150,00	8.089.500,00	32,19
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.383.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.926.000,00	10.525.000,00	8.827.000,00	11.622.000,00	8.952.000,00	9.000.000,00	23,11
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	1.000.000,00	1.460.000,00	2.310.000,00	1.230.000,00	964.000,00	18,23
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.095.921,00	32,30
3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.150.000,00	1.449.500,00	38,97
3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.560.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	37.500.000,00	44,55
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	9.950.000,00	3.101.750,00	7.114.150,00	9.834.100,00	549.000,00	2,39
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	402.000,00	988.000,00	660.000,00	950.000,00	0,00	36,33
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00

Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 10 Juli 2023
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



YAN AMALIA, SE

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan III	Capaian Hingga Triwulan III (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	-	86	-	86	0	100,00	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Cakupan Layanan Kecamatan	%	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67	100,00	-	-

No	Program	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan III (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.295.769.500,00	505.911.145,00	639.411.860,00	651.906.810,00	498.539.685,00	602.025.231,00	68,70
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.000.000,00	7.957.000,00	8.956.000,00	5.585.000,00	3.502.000,00	11.282.600,00	94,33
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.000.000,00	52.718.000,00	6.700.000,00	6.582.000,00	0,00	1.500.000,00	75,94
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	2.331.000,00	575.000,00	669.000,00	1.425.000,00	575.000,00	58,12
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.140.000,00	3.485.000,00	7.690.000,00	10.740.000,00	2.225.000,00	13.280.000,00	82,08
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.511.500,00	24.761.500,00	35.682.000,00	31.156.000,00	8.912.000,00	52.009.500,00	95,39

Pemalang, 10 Oktober 2023
CAMAT WATUKUMPUL


DEDI SARWOAJI, AP, MH

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
SEKRETARIAT PADA KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan III	Capaian Hingga Triwulan III (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14	3	3	6	2	4	64,29	-	-
2.1	Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Laporan	1	0	0	0	1	0	0,00	-	-
3.1	Tertindakannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	4	4	4	4	4	4	68,75	-	-
4.1	Tertindakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	4	4	4	4	4	4	75,00	-	-
5.1	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	22	5	5	6	6	8	54,55	-	-

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan III (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000,00	3.497.000,00	2.867.000,00	6.736.000,00	1.400.000,00	4.725.102,00	62,88
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.983.880.500,00	425.288.745,00	566.251.660,00	566.251.660,00	426.088.435,00	517.929.931,00	70,27
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.839.000,00	25.883.400,00	19.808.450,00	23.900.000,00	19.247.150,00	19.991.500,00	49,07
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.560.000,00	40.890.000,00	41.400.000,00	42.250.000,00	41.020.000,00	51.079.698,00	72,73
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.990.000,00	10.352.000,00	9.084.750,00	12.769.150,00	10.784.100,00	8.299.000,00	23,50

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Oktober 2023
SEKRETARIS KECAMATAN WATUKUMPUL



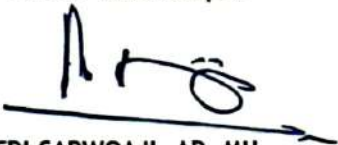
SITI WAHYU NIKMAH, SE

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan III	Capaian Hingga Triwulan III (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1.00	1	0	0	0	0	100,00	-	-
1.2	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	2	2	1	0	2	80,00	-	-
2.1	Tertindakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15.00	3	6	6	0	9	86,67	-	-
2.2	Tertindakannya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	15.00	6	6	3	0	7	86,67	-	-
2.3	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15.00	0	0	7	8	7	46,67	-	-
2.4	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1.00	1	0	0	0	0	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan III (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	6.718.000,00	6.700.000,00	6.582.000,00	0,00	1.500.000,00	74,23
2.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000,00	6.750.000,00	15.250.000,00	13.000.000,00	0,00	15.902.000,00	95,41
2.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.410.000,00	4.866.000,00	4.544.000,00	1.000.000,00	0,00	3.650.000,00	99,10
2.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.500.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	3.250.000,00	5.199.500,00	94,54
2.4	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.655.000,00	2.763.000,00	1.650.000,00	2.442.000,00	1.800.000,00	4.150.000,00	87,38

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Oktober 2023
 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA




NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
SEKSI PELAYANAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan III	Capaian Hingga Triwulan III (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	10.00	5	4	1	0	4	80,00	-	-
1.2	Tertindakannya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6.00	1	2	1	2	0	33,33	-	-
1.3	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	3	0	2	0	0	20,00	-	-
2.1	Tertindakannya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	100.00	35	15	35	15	125	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan III (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000,00	2.904.000,00	2.400.000,00	558.000,00	138.000,00	3.465.000,00	97,00
1.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	135.000,00	2.375.000,00	120.000,00	2.370.000,00	2.610.000,00	100,00
1.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	2.370.000,00	125.000,00	2.375.000,00	130.000,00	2.629.600,00	99,99
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000,00	890.000,00	2.760.000,00	882.000,00	468.000,00	532.000,00	74,14

Camat Watukumpul


 DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Oktober 2023
 KEPALA SEKSI PELAYANAN

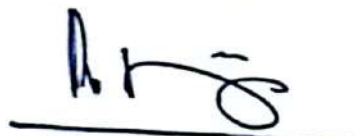

 GIGIH PANUNTUN, S.ST

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan III	Capaian Hingga Triwulan III (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2.00	1	0	1	0	1	100,00	-	-
2.1	Tertindakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	30.00	0	0	30	0	24	100,00	-	-
2.2	Tertindakannya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	30.00	0	0	30	0	15	50,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan III (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	2.331.000,00	575.000,00	669.000,00	1.425.000,00	575.000,00	58,12
2.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000,00	1.235.000,00	1.125.000,00	6.515.000,00	1.125.000,00	7.640.000,00	100,00
2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.140.000,00	1.625.000,00	490.000,00	1.625.000,00	400.000,00	1.715.000,00	51,09

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Oktober 2023
 KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 UMUM



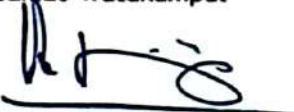
ARIS YUGO SAKSONO, S.PD

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan III	Capaian Hingga Triwulan III (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5.00	3	1	1	0	3	100,00	-	-
2.1	Tertaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2.00	0	2	0	0	1	100,00	-	-
3.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	15.00	15	0	0	0	2	80,00	-	-
3.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15.00	5	7	0	3	6	80,00	-	-
3.3	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	15.00	0	5	10	0	13	100,00	-	-
3.4	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	15.00	7	3	5	0	11	100,00	-	-
3.5	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4.00	0	4	0	0	4	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan III (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	1.658.000,00	1.296.000,00	1.650.000,00	396.000,00	2.046.000,00	100,00
2.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	625.000,00	6.075.000,00	2.600.000,00	700.000,00	3.925.000,00	77,00
3.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.839.500,00	3.202.500,00	0,00	2.475.000,00	1.162.000,00	2.100.000,00	77,53
3.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.482.000,00	3.288.000,00	4.494.000,00	0,00	2.700.000,00	4.350.000,00	100,00
3.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000,00	0,00	3.611.000,00	6.389.000,00	0,00	6.775.000,00	100,00
3.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.625.000,00	3.892.000,00	1.133.000,00	3.600.000,00	0,00	6.383.000,00	100,00
3.5	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	100,00

Camat Watukumpul


DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Oktober 2023
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN


IR. SITI KHOPSAH

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan III	Capaian Hingga Triwulan III (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2.00	1	1	0	0	1	100,00	-	-
1.2	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Merealisasikan pada Triwulan IV
1.3	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	1	100,00	-	-
1.4	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Merealisasikan pada Triwulan IV
1.5	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	0,00	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Merealisasikan pada Triwulan IV
1.6	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4.00	1	1	1	1	1	75,00	-	-

1.7	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	1	1	1	1	1	75,00	-	-
2.1	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	0	0	0	1	0	0,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan III (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.775.000,00	225.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	750.000,00	1.250.000,00	1.553.000,00	77,65
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	0,00	907.000,00	1.093.000,00	0,00	300.000,00	15,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	975.000,00	48,75
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	700.000,00	585.000,00	715.000,00	0,00	1.165.102,00	89,51
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.022.000,00	850.000,00	478.000,00	150.000,00	630.000,00	100,00
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	30,00

Sekretaris Kecamatan Watukumpul



SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 10 Oktober 2023
 PLT. KEPALA SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN
 KEUANGAN



NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan III	Capaian Hingga Triwulan III (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14.00	14	14	14	14	14	75,00	-	-
2.1	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4.00	1	1	1	1	1	75,00	-	-
2.2	Tertindakannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	25.00	7	5	6	7	10	72,00	-	-
2.3	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2.00	1	1	0	0	0	0,00	Masih tersedianya stock kendali masuk dan keluar	Merealisasikan pada Triwulan IV
2.4	Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36.00	9	9	9	9	13	69,44	-	-
3.1	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	75,00	-	-
3.2	Tertindakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36.00	9	9	9	9	9	75,00	-	-
3.3	Tertindakannya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	75,00	-	-
3.4	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3	5	75,00	-	-

4.1	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16.00	4	3	4	5	5	50,00	-	-
4.2	Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3.00	1	1	0	1	1	66,67	-	-
4.3	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	3.00	0	1	2	0	2	66,67	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan III (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.981.880.500,00	424.688.745,00	566.251.660,00	566.251.660,00	424.688.435,00	517.929.931,00	70,31
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	1.883.400,00	1.126.600,00	970.000,00	1.020.000,00	1.745.000,00	67,98
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.530.000,00	11.725.000,00	8.104.850,00	10.425.000,00	9.275.150,00	11.276.500,00	60,71
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.383.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.926.000,00	10.525.000,00	8.827.000,00	11.622.000,00	8.952.000,00	6.970.000,00	40,57
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	1.000.000,00	1.460.000,00	2.310.000,00	1.230.000,00	1.741.000,00	47,25
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.401.705,00	48,50
3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.150.000,00	1.258.000,00	64,13
3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.560.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	44.678.993,00	78,00
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	9.950.000,00	3.101.750,00	7.114.150,00	9.834.100,00	4.164.000,00	16,27
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	402.000,00	988.000,00	660.000,00	950.000,00	795.000,00	62,83
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	3.340.000,00	33,43

Sekretaris Kecamatan Watukumpul



SITI WAHYU HIKMAH, SE

Pemalang, 10 Oktober 2023
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



YAN AMALIA, SE

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan IV	Capaian Hingga Triwulan IV (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	-	86	-	86	90,50	100,00	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Cakupan Layanan Kecamatan	%	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67	100,00	-	-

No	Program	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan IV (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.310.681.000,00	505.911.145,00	639.411.860,00	651.906.810,00	513.451.185,00	608.120.702,00	94,58
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.000.000,00	7.957.000,00	8.956.000,00	5.585.000,00	3.502.000,00	1.463.000,00	99,96
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.275.000,00	41.993.000,00	6.700.000,00	6.582.000,00	0,00	5.136.000,00	99,97
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	2.331.000,00	575.000,00	669.000,00	1.425.000,00	2.094.000,00	100,00
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.140.000,00	3.485.000,00	7.690.000,00	10.740.000,00	5.225.000,00	7.325.000,00	100,00
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110.736.500,00	24.761.500,00	35.682.000,00	31.156.000,00	19.137.000,00	14.626.550,00	99,79

Pemalang, 10 Januari 2024
CAMAT WATUKUMPUL



DEDI SARWOAJI, AP, MH

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SEKRETARIAT PADA KECAMATAN WATUKUMPUL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan IV	Capaian Hingga Triwulan IV (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14	3	3	6	2	5	100,00	-	-
2.1	Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Laporan	15	0	0	0	15	15	100,00	-	-
3.1	Tertindakannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Paket	67	4	4	4	55	56	100,00	-	-
4.1	Tertindakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Laporan	72	4	4	4	60	60	100,00	-	-
5.1	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	22	5	5	6	6	10	100,00	-	-

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan IV (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000,00	3.497.000,00	2.867.000,00	6.736.000,00	1.400.000,00	5.375.000,00	99,95
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.996.292.000,00	425.288.745,00	566.251.660,00	566.251.660,00	438.499.935,00	477.073.548,00	93,73
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.859.000,00	25.883.400,00	19.808.450,00	23.900.000,00	20.267.150,00	46.248.350,00	99,98
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.690.000,00	40.890.000,00	41.400.000,00	42.250.000,00	42.150.000,00	46.284.304,00	100,00
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.340.000,00	10.352.000,00	9.084.750,00	12.769.150,00	11.134.100,00	33.139.500,00	99,78

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Januari 2024
SEKRETARIS KECAMATAN WATUKUMPUL




SITI WAHYU NIKMAH, SE

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SEKSI PELAYANAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL**

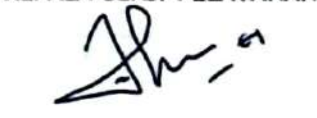
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan IV	Capaian Hingga Triwulan IV (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	10.00	5	4	1	0	2	100,00	-	-
1.2	Tertindakannya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2.00	1	1	0	0	0	100,00	-	-
1.3	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3.00	3	0	0	0	2	100,00	-	-
2.1	Tertindakannya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	600.00	35	15	35	515	94	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan IV (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000,00	2.904.000,00	2.400.000,00	558.000,00	138.000,00	180.000,00	100,00
1.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	135.000,00	2.375.000,00	120.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00
1.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	2.370.000,00	125.000,00	2.375.000,00	130.000,00	0,00	99,99
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000,00	890.000,00	2.760.000,00	882.000,00	468.000,00	1.283.000,00	99,80

Camat Watukumpul


 DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Januari 2024
 KEPALA SEKSI PELAYANAN

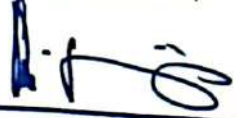

 GIGIH PANUNTUN, S.ST

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan IV	Capaian Hingga Triwulan IV (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1.00	1	0	0	0	0	100,00	-	-
1.2	Tertindakannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	2	2	1	0	1	100,00	-	-
2.1	Tertindakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15.00	3	6	6	0	2	100,00	-	-
2.2	Tertindakannya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	15.00	6	6	3	0	2	100,00	-	-
2.3	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15.00	0	0	7	8	8	100,00	-	-
2.4	Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1.00	1	0	0	0	0	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan IV (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	35.275.000,00	35.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	6.718.000,00	6.700.000,00	6.582.000,00	0,00	5.136.000,00	99,91
2.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000,00	6.750.000,00	15.250.000,00	13.000.000,00	0,00	1.600.000,00	99,98
2.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.410.000,00	4.866.000,00	4.544.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	99,10
2.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	5.750.000,00	2.775.000,00	99,68
2.4	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.380.000,00	2.763.000,00	1.650.000,00	2.442.000,00	4.525.000,00	3.714.550,00	99,10

Camat Watukumpul



DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Januari 2024
 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA



NUR INDAH ARIS HARJONO, S.IP.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan IV	Capaian Hingga Triwulan IV (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2.00	1	0	1	0	0	100,00	-	-
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	30.00	0	0	30	0	0	100,00	-	-
2.2	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	30.00	0	0	30	0	15	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan IV (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	2.331.000,00	575.000,00	669.000,00	1.425.000,00	2.094.000,00	100,00
2.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.000.000,00	1.235.000,00	1.125.000,00	6.515.000,00	4.125.000,00	3.000.000,00	100,00
2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.140.000,00	1.625.000,00	490.000,00	1.625.000,00	400.000,00	2.025.000,00	100,00

Camat Watukumpul


 DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Januari 2024
 KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 UMUM

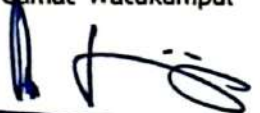

 ARIS YUGO SAKSONO, S.PD

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan IV	Capaian Hingga Triwulan IV (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5.00	3	1	1	0	0	100,00	-	-
2.1	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2.00	0	2	0	0	0	100,00	-	-
3.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	15.00	15	0	0	0	3	100,00	-	-
3.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15.00	5	7	0	3	3	100,00	-	-
3.3	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	15.00	0	5	10	0	0	100,00	-	-
3.4	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	15.00	7	3	5	0	0	100,00	-	-
3.5	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4.00	0	4	0	0	0	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan IV (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	1.658.000,00	1.296.000,00	1.650.000,00	396.000,00	0,00	100,00
2.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	625.000,00	6.075.000,00	2.600.000,00	700.000,00	2.300.000,00	100,00
3.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.839.500,00	3.202.500,00	0,00	2.475.000,00	1.162.000,00	1.537.000,00	100,00
3.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.982.000,00	3.288.000,00	4.494.000,00	0,00	5.200.000,00	2.500.000,00	100,00
3.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000,00	0,00	3.611.000,00	6.389.000,00	0,00	0,00	100,00
3.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.625.000,00	3.892.000,00	1.133.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	100,00
3.5	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

Camat Watukumpul


DEDI SARWOAJI, AP, MH

Pemalang, 10 Januari 2024
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN


IR. SITI KHOPSAH

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan IV	Capaian Hingga Triwulan IV (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14.00	14	14	14	14	14	100,00	-	-
2.1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4.00	1	1	1	1	1	100,00	-	-
2.2	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	25.00	7	5	6	7	7	100,00	-	-
2.3	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2.00	1	1	0	0	2	100,00	-	-
2.4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36.00	9	9	9	9	11	100,00	-	-
3.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	100,00	-	-
3.2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36.00	9	9	9	9	9	100,00	-	-
3.3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	100,00	-	-
3.4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3	3	100,00	-	-

4.1	Tertaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16.00	4	3	4	5	8	100,00	-	-
4.2	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3.00	1	1	0	1	1	100,00	-	-
4.3	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	3.00	0	1	2	0	1	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan IV (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.994.292.000,00	424.688.745,00	566.251.660,00	566.251.660,00	437.099.935,00	475.673.548,00	93,72
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.650.000,00	1.883.400,00	1.126.600,00	970.000,00	670.000,00	1.250.000,00	99,98
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.528.000,00	11.725.000,00	8.104.850,00	10.425.000,00	6.273.150,00	12.526.350,00	100,00
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.033.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	883.000,00	650.000,00	5.033.000,00	100,00
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.648.000,00	10.525.000,00	8.827.000,00	11.622.000,00	12.674.000,00	27.439.000,00	99,97
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	1.000.000,00	1.460.000,00	2.310.000,00	1.230.000,00	3.165.000,00	100,00
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.130.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	6.380.000,00	11.944.697,00	100,00
3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.150.000,00	1.793.600,00	100,00
3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.560.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00	29.381.007,00	100,00
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000,00	9.950.000,00	3.101.750,00	7.114.150,00	6.834.100,00	22.024.500,00	99,64
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.350.000,00	402.000,00	988.000,00	660.000,00	4.300.000,00	4.465.000,00	100,00
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	6.650.000,00	100,00

Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 10 Januari 2024
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


YAN AMALIA, SE

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Target				Realisasi Triwulan IV	Capaian Hingga Triwulan IV (%)	Permasalahan	Solusi
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2.00	1	1	0	0	0	100,00	-	-
1.2	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	1	100,00	-	-
1.3	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	0	100,00	-	-
1.4	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	1	100,00	-	-
1.5	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	1	0	1	100,00	-	-
1.6	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4.00	1	1	1	1	1	100,00	-	-

1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	1	1	1	1	1	100,00	-	-
2.1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	0	0	0	1	1	100,00	-	-

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target				Realisasi Triwulan IV (Bukan Akumulasi)	Capaian Hingga Triwulan IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.775.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	750.000,00	1.250.000,00	447.000,00	100,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	0,00	907.000,00	1.093.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	700.000,00	585.000,00	715.000,00	0,00	203.000,00	99,66
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.022.000,00	850.000,00	478.000,00	150.000,00	0,00	100,00
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00

Sekretaris Kecamatan Watukumpul


SITI WAHYU NIKMAH, SE

Pemalang, 10 Januari 2024
KEPALA SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN
KEUANGAN


SRI WAHYUNI, S.AP.

**REALISASI KINERJA KEUANGAN DAN FISIK
KECAMATAN WATUKUMPUL
BULAN DESEMBER**

Kode	Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output Penetapan (tahunan)		Target Output Perubahan (tahunan)		Kinerja s. d Bulan						Kinerja Rata-rata	Kinerja Tahun 2023 (%)		Permasalahan
						Keuangan (Rp)		Fisik			Kinerja Rata-rata	Keuangan	Fisik						
						Jml	Satuan	Jml	Satuan	Target s.d Bulan				Realisasi s.d Bulan	Capaian		Target s.d Bulan	Realisasi s.d Bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
7	URUSAN KEWILAYAHAN	2,517,421,000	2,534,832,500	17,411,500		496		990		2,534,832,500	2,409,222,380	95.04%	990	990	100.00%	97.52%	95.04%	100.00%	
7.01	KECAMATAN	2,517,421,000	2,534,832,500	17,411,500		496		990		2,534,832,500	2,409,222,380	95.04%	990	990	100.00%	97.52%	95.04%	100.00%	
7.01	KECAMATAN WATUKUMPUL	2,517,421,000	2,534,832,500	17,411,500		496		990		2,534,832,500	2,409,222,380	95.04%	990	990	100.00%	97.52%	95.04%	100.00%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,998,380,500	2,010,792,000	12,411,500		29		29		2,010,792,000	1,885,551,622	93.77%	29	29	100.00%	96.89%	93.77%	100.00%	
		297,389,000	299,889,000	2,500,000		161		161		299,889,000	299,778,273	99.96%	161	161	100.00%	99.98%	99.96%	100.00%	
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	35.8	Nilai					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Indeks Reformasi Birokrasi	36.32	Indeks					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,500,000	14,500,000	0	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	14	dokumen	14	dokumen	14,500,000	14,493,042	99.95%	14	14.0	100.00%	99.98%	99.95%	100.00%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,000,000	2,000,000	0	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	dokumen	2	dokumen	2,000,000	1,999,940	100.00%	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,000,000	2,000,000	0	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	2,000,000	2,000,000	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,000,000	2,000,000	0	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	2,000,000	2,000,000	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	2,000,000	0	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	2,000,000	2,000,000	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,000,000	2,000,000	0	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	2,000,000	2,000,000	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	0	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	dokumen	4	dokumen	2,000,000	1,993,102	99.66%	4	4	100.00%	99.83%	99.66%	100.00%	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,500,000	2,500,000	0	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	dokumen	4	dokumen	2,500,000	2,500,000	100.00%	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,983,880,500	1,996,292,000	12,411,500	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	15	laporan	15	laporan	1,996,292,000	1,871,058,580	93.73%	15	15.0	100.00%	96.86%	93.73%	100.00%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,981,880,500	1,994,292,000	12,411,500	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	orang	14	orang	1,994,292,000	1,869,058,580	93.72%	14	14	100.00%	96.86%	93.72%	100.00%	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	2,000,000	0	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	laporan	1	laporan	2,000,000	2,000,000	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88,839,000	89,859,000	1,020,000	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	67	layanan	67	paket	89,859,000	89,844,850	99.98%	67	67	100.00%	99.99%	99.98%	100.00%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,650,000	- 350,000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	paket	4	paket	4,650,000	4,649,000	99.98%	4	4	100.00%	99.99%	99.98%	100.00%	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,530,000	36,528,000	- 3,002,000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25	paket	25	paket	36,528,000	36,526,850	100.00%	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,383,000	5,033,000	650,000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	2	paket	5,033,000	5,033,000	100.00%	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

**REALISASI KINERJA KEUANGAN DAN FISIK
KECAMATAN WATUKUMPUL**

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39,926,000	43,648,000	3,722,000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	laporan	36	laporan	43,648,000	43,636,000	99.97%	36	36	100.00%	99.99%	99.97%	100.00%	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165,560,000	166,690,000	1,130,000	Jumlah laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	72	jasa	72	laporan	166,690,000	166,689,423	100.00%	72	72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	6,000,000	0	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	12	laporan	6,000,000	6,000,000	100.00%	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,000,000	22,130,000	1,130,000	Jumlah laporan penyediaan jasa sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	laporan	36	laporan	22,130,000	22,129,423	100.00%	36	36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	12	laporan	5,000,000	5,000,000	100.00%	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133,560,000	133,560,000	0	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	12	laporan	133,560,000	133,560,000	100.00%	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42,990,000	43,340,000	350,000	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	22	unit	22	unit	43,340,000	43,244,000	99.78%	22	22	100.00%	99.89%	99.78%	100.00%	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,000,000	27,000,000	3,000,000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	16	unit	16	unit	27,000,000	26,904,000	99.64%	16	16	100.00%	99.82%	99.64%	100.00%	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000	6,350,000	3,350,000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	unit	3	unit	6,350,000	6,350,000	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,990,000	9,990,000	0	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	3	unit	9,990,000	9,990,000	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26,000,000	26,000,000	0	Persentase pelayanan publik yang tersedia	126	%	620	%	26,000,000	25,988,935	99.96%	620	620	100.00%	99.98%	99.96%	100.00%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5	dokumen	5	dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00%	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5	dokumen	5	dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00%	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16,000,000	16,000,000	0	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	21	dokumen	15	dokumen	16,000,000	15,998,935	99.99%	15	15	100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	0	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	10	dokumen	10	dokumen	6,000,000	5,999,855	100.00%	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	6	laporan	2	laporan	5,000,000	4,999,780	100.00%	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	5	laporan	3	laporan	5,000,000	4,999,300	99.99%	3	3	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	dokumen	600	dokumen	5,000,000	4,990,000	99.80%	600	600	100.00%	99.90%	99.80%	100.00%	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	100	dokumen	600	dokumen	5,000,000	4,990,000	99.80%	600	600	100.00%	99.90%	99.80%	100.00%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66,000,000	55,275,000	10,725,000	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	6	%	6	%	55,275,000	55,257,000	99.97%	6	6	100.00%	99.98%	99.97%	100.00%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66,000,000	55,275,000	10,725,000	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	6	dokumen	6	dokumen	55,275,000	55,257,000	99.97%	6	6	100.00%	99.98%	99.97%	100.00%	

**REALISASI KINERJA KEUANGAN DAN FISIK
KECAMATAN WATUKUMPUL**

7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	46,000,000	35,275,000	10,725,000	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	35,275,000	35,275,000	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000	20,000,000	0	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5	laporan	5	laporan	20,000,000	19,982,000	99.91%	5	5	100.00%	99.96%	99.91%	100.00%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,000,000	5,000,000	0	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	2	%	2	%	5,000,000	5,000,000	100.00%	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	2	laporan	2	laporan	5,000,000	5,000,000	100.00%	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,000,000	5,000,000	0	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	2	laporan	2	laporan	5,000,000	5,000,000	100.00%	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24,140,000	27,140,000	3,000,000	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	62	%	62	%	27,140,000	27,140,000	100.00%	62	62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24,140,000	27,140,000	3,000,000	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	62	orang	62	dokumen	27,140,000	27,140,000	100.00%	62	62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10,000,000	13,000,000	3,000,000	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30	orang	30	orang	13,000,000	13,000,000	100.00%	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4,140,000	4,140,000	0	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	30	orang	30	orang	4,140,000	4,140,000	100.00%	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,000,000	10,000,000	0	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	2	dokumen	2	dokumen	10,000,000	10,000,000	100.00%	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100,511,500	110,736,500	10,225,000	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	110	%	110	%	110,736,500	110,506,550	99.79%	110	110	100.00%	99.90%	99.79%	100.00%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,511,500	110,736,500	10,225,000	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun	110	dokumen	110	dokumen	110,736,500	110,506,550	99.79%	110	110	100.00%	99.90%	99.79%	100.00%	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6,839,500	6,839,500	0	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	15	dokumen	15	dokumen	6,839,500	6,839,500	100.00%	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,482,000	12,982,000	2,500,000	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	15	dokumen	15	dokumen	12,982,000	12,982,000	100.00%	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35,000,000	35,000,000	0	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15	dokumen	15	dokumen	35,000,000	34,992,000	99.98%	15	15	100.00%	99.99%	99.98%	100.00%	

**REALISASI KINERJA KEUANGAN DAN FISIK
KECAMATAN WATUKUMPUL**

7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10,000,000	10,000,000	0	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15	dokumen	15	dokumen	10,000,000	10,000,000	100.00%	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8,625,000	8,625,000	0	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15	dokumen	15	dokumen	8,625,000	8,625,000	100.00%	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5,000,000	7,500,000	2,500,000	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	4	dokumen	4	dokumen	7,500,000	7,500,000	100.00%	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10,410,000	10,410,000	0	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	15	dokumen	15	dokumen	10,410,000	10,316,000	99.10%	15	15	100.00%	99.55%	99.10%	100.00%	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5,500,000	8,000,000	2,500,000	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	15	dokumen	15	dokumen	8,000,000	7,974,500	99.68%	15	15	100.00%	99.84%	99.68%	100.00%	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8,655,000	11,380,000	2,725,000	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	1	dokumen	1	dokumen	11,380,000	11,277,550	99.10%	1	1	100.00%	99.55%	99.10%	100.00%	

PETUNJUK PENGISIAN :

Kolom 1 diisi kode rekening urusan, bidang, unit, sub unit, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2020

Kolom 2 diisi urusan, bidang, unit, sub unit, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2020

Kolom 3 diisi pagu anggaran tahun 2023

Kolom 4 diisi output/keluaran sub kegiatan, kegiatan, program (mengacu pada dokumen DPA tahun 2023)

Kolom 5 diisi target tahunan output (volume dan satuan)

Kolom 6 (Keuangan kolom Rp diisi target anggaran yang pada bulan n, kolom % diisi target anggaran bln n dibagi pagu anggaran setahun dikali 100%

Kolom 6 (Fisik) kolom jml diisi jml target output/keluaran pada bulan n, kolom % diisi jml target output bln n dibagi jml output setahun dikali 100%

Kolom 7 s/d 17 (K: kolom Rp diisi target anggaran yang pada bulan n ditambah dengan target anggaran bulan n-1, kolom % diisi target anggaran bln n ditambah target anggaran n-1 dibagi pagu anggaran setahun dikali 100%

Kolom 7 s/d 17 (Fi: kolom jml diisi jml target output/keluaran pada bulan n ditambah jml target output keluaran n-1, kolom % diisi jml target output bln n ditambah jml target output bln n-1 dibagi jml output setahun dikali 100%

LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN WATUKUMPUL



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL**

Watukumpul, 10 Juli 2023

Kepada Yth :
Bupati Pemalang
Cq. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Pemalang
di -

PEMALANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.11 / 318

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Kecamatan Watukumpul Semester I Tahun 2023.	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa guna seperlunya.

CAMAT WATUKUMPUL

DEDI SARWOAJI, AP. MH
Pembina Tk.I
NIP.19741206 199311 1 001

PARAF	KASI	SEKCAM
HIRARKI	+	st

Tembusan Yth :
Sekretariat Kecamatan Watukumpul.

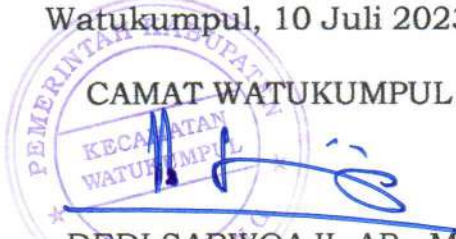
Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia-Nya, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terdapat dalam laporan ini merupakan cerminan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Watukumpul. Hasil dan Saran Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi bahan dalam penyusunan rencana perbaikan kualitas kinerja pelayanan secara berkelanjutan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Watukumpul.

Semoga hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Watukumpul, 10 Juli 2023


CAMAT WATUKUMPUL
DEDI SARWOAJI, AP., MH
NIP. 19741206 199311 1 001

Daftar Isi

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud	1
C. Tujuan	1
D. Prinsip	2
E. Manfaat	3
BAB II	
Analisis dan Pembahasan	4
A. Profil Unit Pelayanan	4
B. Metode Pelaksanaan	4
1. Perencanaan.....	4
2. Tim Pelaksana Survei.....	4
3. Lokasi.....	5
4. Waktu Pelaksanaan.....	5
5. Teknik Survei.....	5
6. Responden.....	5
7. Bentuk Jawaban.....	5
8. Pengolahan dan Analisis Data.....	6
9. Kategorisasi Hasil Pengukuran SKM.....	7
10. Penyusunan Laporan.....	7
C. Analisis dan Pembahasan	8
1. Karakteristik Responden.....	8
2. Indeks Nilai Perunsur Pelayanan.....	9
3. Saran Perbaikan dari Masyarakat.....	9
BAB IV	
Penutup	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	11

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

B. Maksud

Maksud dari kegiatan ini, adalah :

- a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga diperoleh Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya;
- b. Memetakan kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna layanan;
- c. Mengidentifikasi Harapan Masyarakat akan pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul.

C. Tujuan

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini, adalah :

- a. Terukurnya Kepuasan Masyarakat Kecamatan Watukumpul Semester I Tahun 2023;
- b. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul;

- c. Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul;
- d. Terpetakannya kelemahan dan kekurangan pelayanan Kecamatan Watukumpul;
- e. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator Renstra Kecamatan Watukumpul;
- f. Sebagai ukuran dasar dalam penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.

D. Prinsip

Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

E. Manfaat

Survei kepuasan masyarakat memiliki manfaat yaitu:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

Analisis dan Pembahasan

A. Profil Unit Pelayanan

Watukumpul adalah salah satu kecamatan / camat yang ada di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kantor kecamatan Watukumpul beralamat di Jalan Raya Watukumpul No. 61, Desa Watukumpul RT 001 RW 04 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Melalui kantor kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Penyelenggaraan Reklame, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Datang Penduduk, Dispensasi Nikah, Rekomendasi Pendirian Kelompok Kesenian/ Sanggar Seni, Pelayanan BPJS Drop box, Surat Keterangan Tanah dan Ahli Waris dan lainnya (SKTM, SKCK dan Proposal).

B. Metode Pelaksanaan

1. Perencanaan

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di unit pelayanan lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang pada Semester I tahun 2023 ini dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Survei;
- b. Penyusunan Instrumen Survei;
- c. Penentuan Besaran dan Teknik Penarikan Sampel;
- d. Penentuan Responden;
- e. Pelaksanaan Survei;
- f. Pengolahan Hasil Survei;
- g. Penyajian Laporan Hasil Survei.

2. Tim Pelaksana Survei

Tim pelaksana SKM Kecamatan Watukumpul terdiri dari:

- 1) Pengarah.
- 2) Pelaksana, terdiri dari:
 - a) Ketua.

b) Anggota sekaligus sebagai surveior.

3) Sekretariat.

3. Lokasi

Lokasi pelaksanaan SKM berada pada tempat layanan Kecamatan Watukumpul dan dilakukan pengisian SKM secara online dengan link <https://bit.ly/3NgDlc8>.

4. Waktu Pelaksanaan

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan pada bulan Januari s/d Juli Tahun 2023.

5. Teknik Survei

Untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul tahun 2023. Tim pelaksana survei menggunakan teknik pengisian kuesioner dengan mendatangi langsung lokasi survei dan membagikan kuesioner kepada pengunjung unit layanan publik. Selain itu dilakukan pengisian SKM secara online dengan link <https://bit.ly/3NgDlc8>.

6. Responden

Responden dipilih secara acak (*random sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing layanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan berdasarkan tabel morgan dan krejcie.

7. Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila :

- a. Diberi nilai 1 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- b. Diberi nilai 2 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

- c. Diberi nilai 3 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- d. Diberi nilai 4 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

8. Pengolahan dan Analisis Data

Hasil survei disusun dalam bentuk laporan. Dokumen tersebut menyajikan informasi tentang perkembangan unit pelayanan dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111111$$

Interpretasi nilai SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

9. Kategorisasi Hasil Pengukuran SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

10. Proses Kontrol Kualitas

Monitoring kelengkapan pengisian kuesioner dan Cek kelengkapan kuesioner dilakukan dengan :

1. Cek fisik kelengkapan jawaban dalam kuesioner, dilakukan oleh surveyor pada saat wawancara berakhir.
2. Input data isian kuesioner dilakukan setiap hari sekaligus memastikan bahwa kuesioner telah terisi dengan lengkap.

11. Penyusunan Laporan

Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, sehingga terstandardisasi. Selain itu Survei Kepuasan Masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang di dapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat.

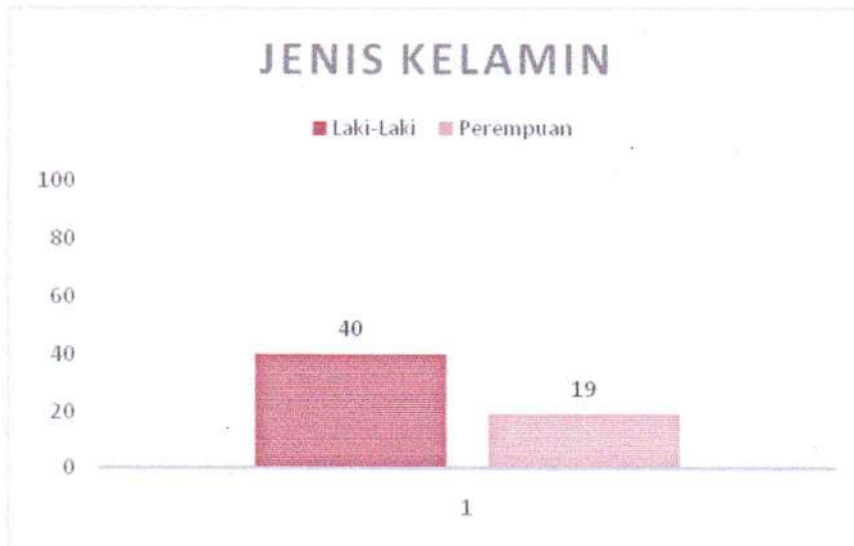
C. Analisis dan Pembahasan

Target responden Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Watukumpul Semester I tahun 2023 ini adalah pengguna layanan di Kecamatan Watukumpul dalam enam bulan terakhir. Diperoleh 59 responden dari 9 layanan di Kecamatan Watukumpul. Hasil analisis data survei disampaikan sebagai berikut:

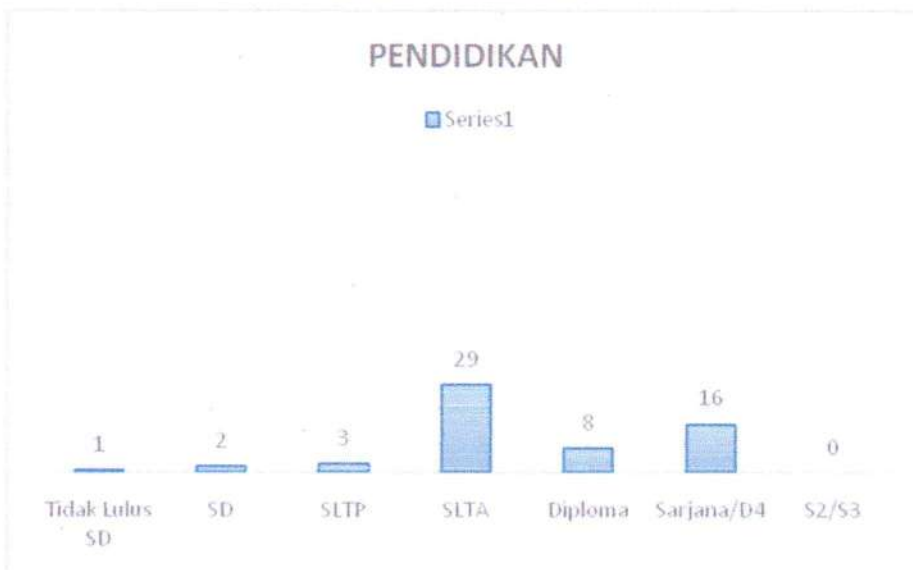
1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penyusunan SKM Pelayanan Kecamatan Watukumpul Semester I tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

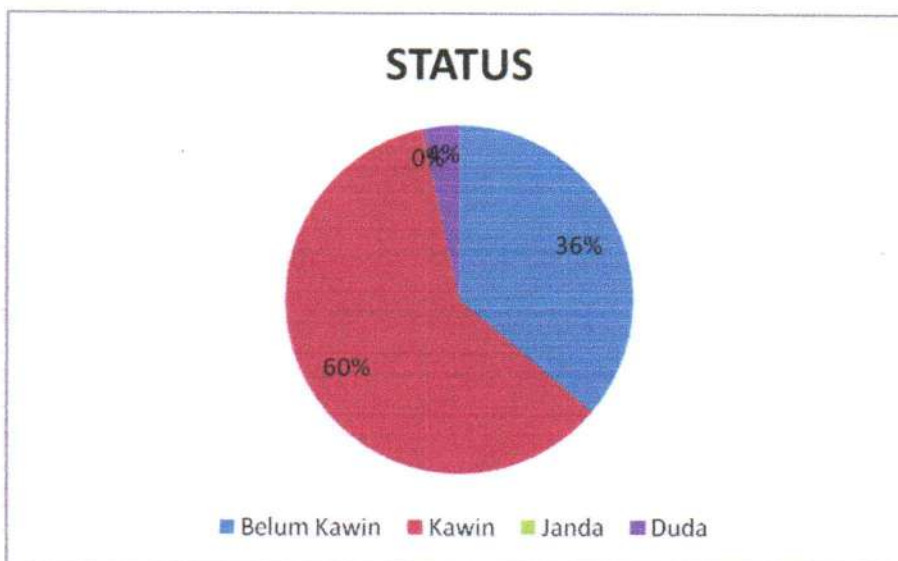
a. Karakteristik responden pada Pelayanan Kecamatan Watukumpul berdasarkan jenis kelamin.



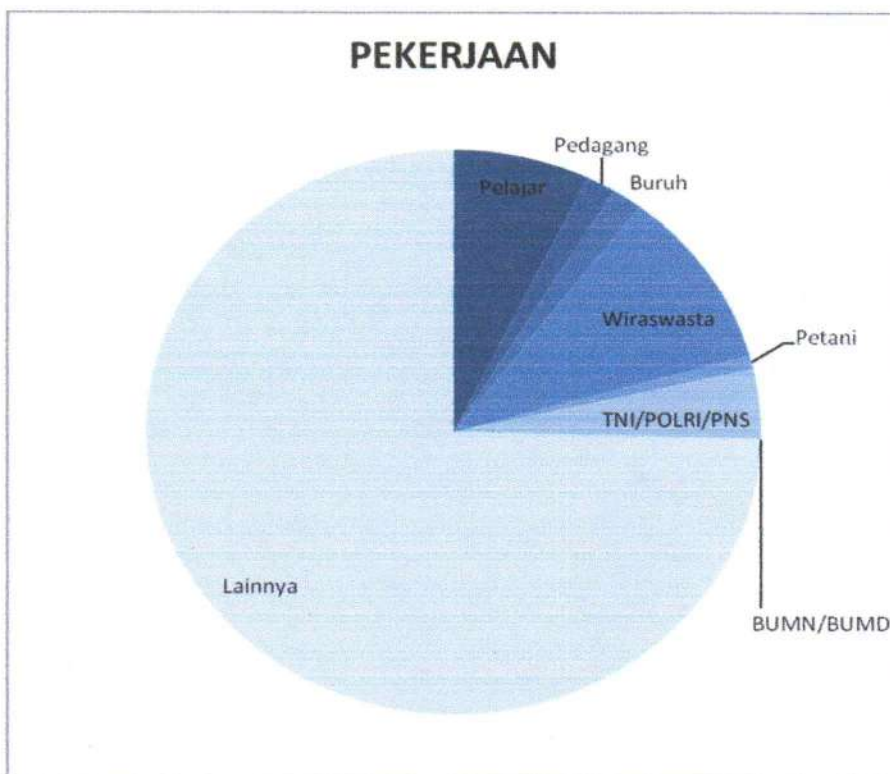
b. Karakteristik responden pada Pelayanan Kecamatan Watukumpul berdasarkan Pendidikan.



- c. Karakteristik responden pada Pelayanan Kecamatan Watukumpul berdasarkan Status Perkawinan.

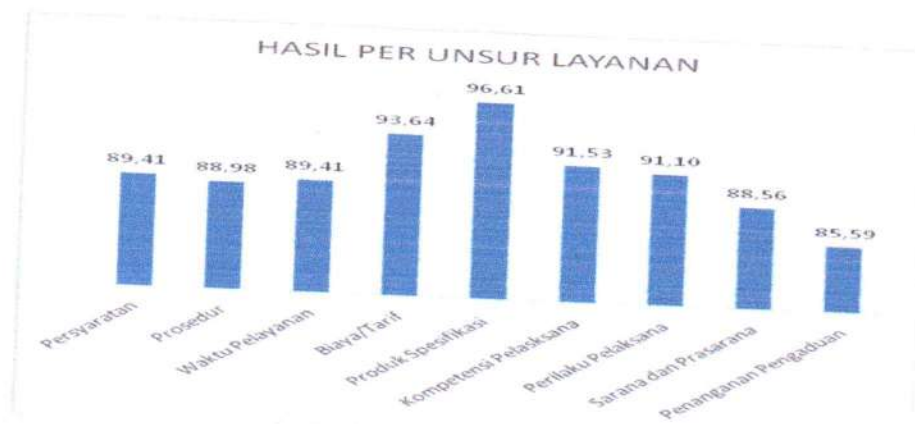


- d. Karakteristik responden pada Pelayanan Kecamatan Watukumpul berdasarkan Pekerjaan.



2. Indeks Nilai Perunsur Pelayanan

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM Semester I layanan Kecamatan Watukumpul tahun 2023, indeks per unsur pelayanan meliputi:



3. Saran Perbaikan dari Masyarakat

Terdapat saran perbaikan yang disampaikan langsung oleh masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat pada Kecamatan Watukumpul. Beberapa saran perbaikan tersebut antara lain:

- a. Cetak KK, KTP bayar 20.000 per dokumen, dasarnya dari mana? Sepengetahuan dari penerima layanan bahwa pelayanan adminduk gratis.
- b. SMS center atau WA diaktifkan kembali
- c. Tempat parkir masyarakat yang belum memadai, sehingga tidak beraturan
- d. Lama waktu tunggu pembuatan KTP harus ada standarisasinya berapa hari
- e. Kedepannya ada pelayanan online, website ataupun aplikasi yang mumpuni
- f. Selalu tingkatkan pelayanan di Kecamatan Watukumpul

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka berikut ini disimpulkan beberapa hal:

1. Rangkuman hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang :

No	Unsur Layanan	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2	3	4
1	Syarat	89.41	Sangat Baik
2	Prosedur	88.98	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	89.41	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	93.64	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi	96.61	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	91.53	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	91.10	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	88.56	Sangat baik
9	Penanganan Pengaduan	85.59	Baik
IKM		90,45	Sangat Baik

2. Sesuai dengan indeks yang diperoleh, maka jika merujuk pada pengkategorisasian mutu layanan dapat dikatakan bahwa kinerja **pelayanan publik** Kecamatan Watukumpul **masuk pada kategori A (Sangat Baik)**. Diantara 9 (Sembilan) layanan

publik yang disurvei, 8 layanan memperoleh predikat sangat baik dan 1 layanan memperoleh predikat baik. Meskipun telah memperoleh predikat sangat baik dalam hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, penyelenggara layanan hendaknya tidak cepat berpuas diri dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

3. Unsur-unsur kepuasan masyarakat yang menjadi perhatian pengguna pelayanan agar dapat ditingkatkan adalah Penanganan Pengaduan.

B. Saran

- a. Cetak KK, KTP bayar 20.000 per dokumen, dasarnya dari mana? Sepengetahuan dari penerima layanan bahwa pelayanan adminduk gratis.
- b. SMS center atau WA diaktifkan kembali
- c. Tempat parkir masyarakat yang belum memadai, sehingga tidak beraturan
- d. Lama waktu tunggu pembuatan KTP harus ada standarisasinya berapa hari
- e. Kedepannya ada pelayanan online, website ataupun aplikasi yang mumpuni
- f. Selalu tingkatkan pelayanan di Kecamatan Watukumpul

C. Rencana Tindak Lanjut

Melihat dari saran yang ada, unit pelayanan publik kecamatan Watukumpul akan melaksanakan inovasi yang sudah dibuat yaitu aplikasi PEMALANG (Pelayanan Mandiri Lancar Lan Ora Ngantri). Akan lebih aktif dalam memberikan informasi lewat media sosial milik Kecamatan Watukumpul. Hasil IKM akan kami tampilkan di Media Sosial. Kami juga akan melakukan Forum Konsultasi Publik dengan masyarakat dan Dinas terkait dengan evaluasi hasil SKM

Watukumpul, 10 Juli 2023

CAMAT WATUKUMPUL

DEDI SARWOAJI, AP., MH
NIP. 19741206 199311 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL**

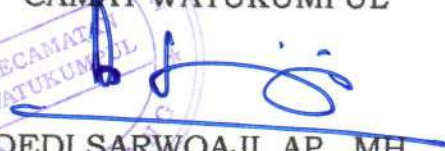
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PERANGKAT DAERAH/ UPT KABUPATEN PEMALANG
BULAN/ TRI WULAN/ SEMESTER I TAHUN 2023

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : Kecamatan Watukumpul
90,45	RESPONDEN Jumlah : 59 Orang Jenis Kelamin : L= 40 / P= 19 Pendidikan : <ul style="list-style-type: none">• SD : 2• SMP : 3• SMA : 29• Diploma : 8• Sarjana : 16• S2/S3 : 0 Periode Survei = Januari s/d Juli 2023

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan, masukan Anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit Kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat

Watukumpul, 10 Juli 2023

CAMAT WATUKUMPUL


DEDI SARWOAJI, AP., MH
NIP. 19741206 199311 1 001

**PENGOLAHAN DATA KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEMESTER I TAHUN 2023**

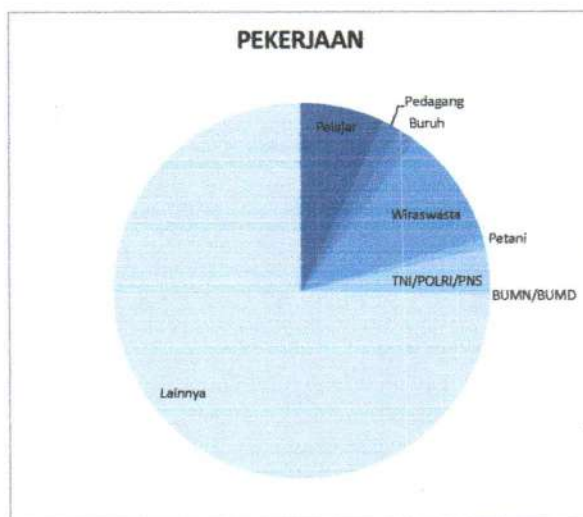
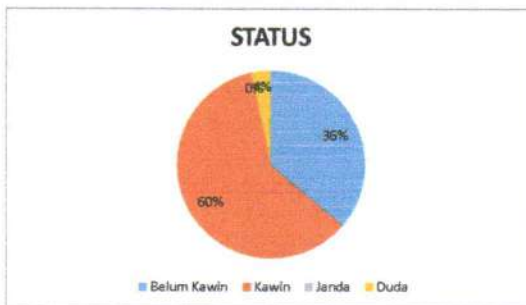
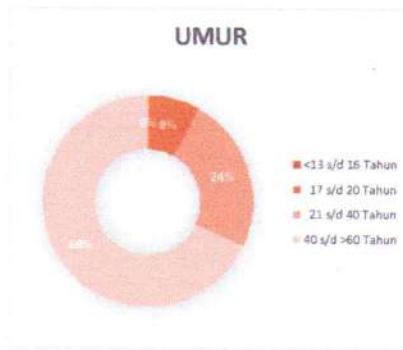
UNIT PELAYANAN : KECAMATAN WATUKUMPUL
 ALAMAT : JL.RAYA WATUKUMPUL NO. 61
 TELEPON/HP. : 0821 3416 2962

NO. RESP	Umur				J. Kelamin		Status			Pendidikan						Pekerjaan									
	<13 s/d 16 Tahun	17 s/d 20 Tahun	21 s/d 40 Tahun	40 s/d >60 Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Belum Kawin	Kawin	Janda	Duda	Tidak Lulus SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Serjana/D4	S2/S3	Pelajar	Pedagang	Buruh	Wiraswasta	Petani	TNI/POLRI/PNS	BUMN/BUMD	Lainnya
1			1			1		1							1				1						
2				1		1		1							1					1					
3		1				1	1								1					1					
4			1	1						1						1									1
5			1	1						1					1						1				
6			1	1						1					1						1				1
7			1	1						1					1								1		
8			1	1						1					1								1		
9			1	1			1	1							1								1		
10			1	1						1					1										1
11			1	1						1					1								1		
12			1	1						1			1												1
13			1	1						1					1								1		
14			1	1						1					1						1				
15			1	1						1					1										1
16			1	1						1					1							1			
17			1	1						1					1						1				
18			1	1						1					1										1
19			1	1						1					1										1
20			1	1						1					1										1
21			1	1						1					1										1
22			1	1						1					1						1				
23			1	1						1					1										1
24		1		1						1				1											1
25			1	1						1				1											1
26			1	1						1					1										1
27			1	1						1					1								1		
28			1	1						1					1						1				
29			1	1						1					1										1
30			1	1						1					1										1
31			1	1						1					1										1
32			1	1						1					1										1
33			1	1						1					1										1
34			1	1						1					1										1
35		1		1						1					1										1
36			1	1						1					1							1			
37			1	1						1					1						1				
38			1	1						1					1										1
39			1	1						1					1										1
40			1	1						1					1										1
41			1	1						1					1										1
42			1	1						1					1							1			
43			1	1						1					1										1
44			1	1						1					1										1
45			1	1						1					1							1			
46			1	1						1					1										1
47			1	1						1					1										1
48			1	1						1					1							1			
49			1	1						1					1										1
50			1	1						1					1										1
51			1	1						1					1										1
52			1	1						1					1										1
53			1	1						1					1										1
54			1	1						1					1										1
55			1	1						1					1										1
56			1	1						1					1										1
57			1	1						1					1										1
58			1	1						1					1										1
59			1	1						1					1										1
JUMLAH	0	10	30	86	40	19	21	35	0	2	1	2	3	29	8	16	0	9	2	2	13	1	5	0	94

Keterangan
 Umur
 1 : <13 s/d 16
 2 : 17 s/d 20
 3 : 21 s/d 40
 4 : 40 s/d >60


 Watukumpul, 10 Juli 2023
 Camat Watukumpul

DEDI SARWOAJI, A.P.,MH
 Pembina Tk.I
 NIP.19741206 199311 1 001



**INSTRUMEN PENGOLAHAN DATA KEPUASAN MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN**

PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEMESTER I TAHUN 2023

UNIT PELAYANAN : KECAMATAN WATUKUMPUL
ALAMAT : JL. RAYA WATUKUMPUL NO. 61
TELEPON/HP. :0821 3416 2962

NO. RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KET.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	4	3	4	4	4	4	4	3	4	
60										
ΣNilai /Unsur	211	210	211	221	228	216	215	209	202	
NRR / Unsur	3,576	3,559	3,576	3,746	3,864	3,661	3,644	3,542	3,424	
NRR tertbg/ unsur	0,397	0,395	0,397	0,416	0,429	0,406	0,404	0,393	0,380	*)
IKM Unit Pelayanan										**) 90,446

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-
U1	Persyaratan	3,58
U2	Prosedur	3,56
U3	Waktu Pelayanan	3,58
U4	Biaya/Tarif	3,75
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86
U6	Kompetensi Pelaksana	3,66
U7	Perilaku Pelaksana	3,64
U8	Sarana dan Prasarana.	3,54
U9	Penanganan Pengaduan, Saran, M	3,42

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00**
- B (Baik) : 76,61 - 88,30**
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60**
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99**

IKM UNIT PELAYANAN :	90,45
	SANGAT BAIK

Watukumpul, 10 Juli 2023

Camat Watukumpul

DEDI SARWOJI, A.P.,MH
Pembina Tk. I
NIP: 19741206 199311 1 001

Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Produk Spesifikasi	Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Prasarana	Pengaduan
89,41	88,98	89,41	93,64	96,61	91,53	91,10	88,56	85,59



LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN WATUKUMPUL
SEMESTER II TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia-Nya, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Watukumpul. Kabupaten Pemalang Tahun 2023 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terdapat dalam laporan ini merupakan cerminan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Watukumpul. Hasil dan Saran Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi bahan dalam penyusunan rencana perbaikan kualitas kinerja pelayanan secara berkelanjutan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Watukumpul.

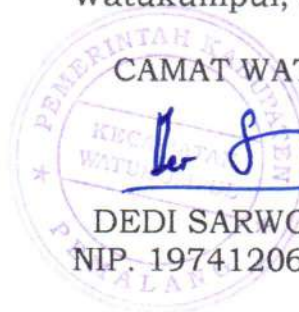
Semoga hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Watukumpul, 3 Januari 2024

CAMAT WATUKUMPUL



DEDI SARWOAJI, AP., MH
NIP. 19741206 199311 1 001



Daftar Isi

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud	1
C. Tujuan	1
D. Prinsip	2
E. Manfaat	3
BAB II	
Analisis dan Pembahasan	4
A. Profil Unit Pelayanan	4
B. Metode Pelaksanaan	4
1. Perencanaan.....	4
2. Tim Pelaksana Survei.....	4
3. Lokasi.....	4
4. Waktu Pelaksanaan.....	4
5. Teknik Survei.....	4
6. Responden.....	5
7. Bentuk Jawaban.....	5
8. Pengolahan dan Analisis Data.....	5
9. Kategorisasi Hasil Pengukuran SKM.....	6
10. Penyusunan Laporan.....	7
C. Analisis dan Pembahasan	7
1. Karakteristik Responden.....	7
2. Indeks Nilai Perunsur Pelayanan.....	9
3. Saran Perbaikan dari Masyarakat.....	9
BAB IV	
Penutup	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	11
C. Rencana Tindak Lanjut	11

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

B. Maksud

Maksud dari kegiatan ini, adalah :

- a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga diperoleh Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya;
- b. Memetakan kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna layanan;
- c. Mengidentifikasi Harapan Masyarakat akan pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul.

C. Tujuan

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini, adalah :

- a. Terukurnya Kepuasan Masyarakat Kecamatan Watukumpul Semester II Tahun 2023;
- b. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul;

- c. Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul;
- d. Terpetakannya kelemahan dan kekurangan pelayanan Kecamatan Watukumpul;
- e. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator Renstra Kecamatan Watukumpul;
- f. Sebagai ukuran dasar dalam penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.

D. Prinsip

Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

E. Manfaat

Survei kepuasan masyarakat memiliki manfaat yaitu:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

Analisis dan Pembahasan

A. Profil Unit Pelayanan

B. Metode Pelaksanaan

1. Perencanaan

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di unit pelayanan lingkup Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya pada Semester II tahun 2022 ini dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Survei;
- b. Penyusunan Instrumen Survei;
- c. Penentuan Besaran dan Teknik Penarikan Sampel;
- d. Penentuan Responden;
- e. Pelaksanaan Survei;
- f. Pengolahan Hasil Survei;
- g. Penyajian Laporan Hasil Survei.

2. Tim Pelaksana Survei

Tim pelaksana SKM Kecamatan Watukumpul terdiri dari:

- 1) Pengarah.
- 2) Pelaksana, terdiri dari:
 - a) Ketua.
 - b) Anggota sekaligus sebagai surveior.
- 3) Sekretariat.

3. Lokasi

Lokasi pelaksanaan SKM berada pada tempat layanan Kecamatan Watukumpul.

4. Waktu Pelaksanaan

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Desember Tahun 2023.

5. Teknik Survei

Untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul tahun 2019. Tim pelaksana survei menggunakan teknik pengisian kuesioner dengan mendatangi langsung lokasi survei

dan membagikan kuesioner kepada pengunjung unit layanan publik.

6. Responden

Responden dipilih secara acak (*random sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing layanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan berdasarkan tabel morgan dan krejcie.

7. Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila :

- a. Diberi nilai 1 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- b. Diberi nilai 2 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- c. Diberi nilai 3 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- d. Diberi nilai 4 apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

8. Pengolahan dan Analisis Data

Hasil survei disusun dalam bentuk laporan. Dokumen tersebut menyajikan informasi tentang perkembangan unit pelayanan dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur

pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111111$$

Interpretasi nilai SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

9. Kategorisasi Hasil Pengukuran SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

10. Proses Kontrol Kualitas

Monitoring kelengkapan pengisian kuesioner dan Cek kelengkapan kuesioner dilakukan dengan :

1. Cek fisik kelengkapan jawaban dalam kuesioner, dilakukan oleh surveyor pada saat wawancara berakhir.
2. Input data isian kuesioner dilakukan setiap hari sekaligus memastikan bahwa kuesioner telah terisi dengan lengkap.

11. Penyusunan Laporan

Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, sehingga terstandardisasi. Selain itu Survei Kepuasan Masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang di dapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat.

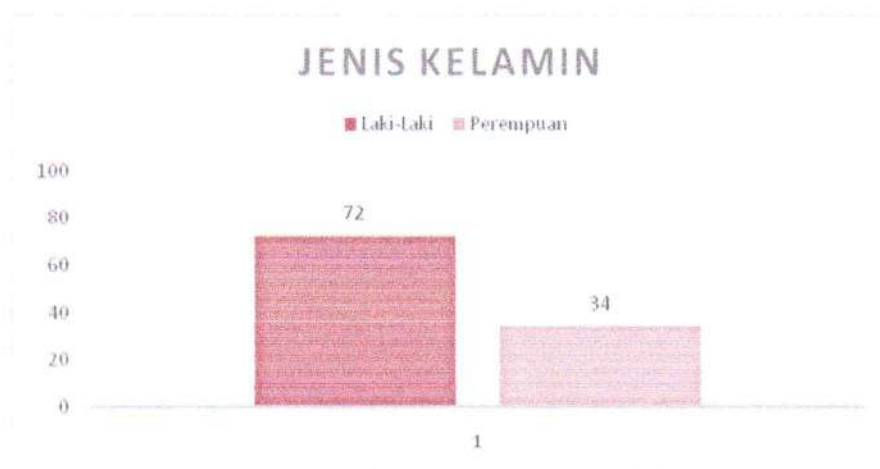
C. Analisis dan Pembahasan

Target responden Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Watukumpul Semester II tahun 2023 ini adalah pengguna layanan di Kecamatan Watukumpul dalam enam bulan terakhir. Diperoleh 106 responden dari 9 layanan di Kecamatan Watukumpul. Hasil analisis data survei disampaikan sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penyusunan SKM Pelayanan Kecamatan Watukumpul Semester II tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Karakteristik responden pada Pelayanan Kecamatan Watukumpul berdasarkan jenis kelamin.

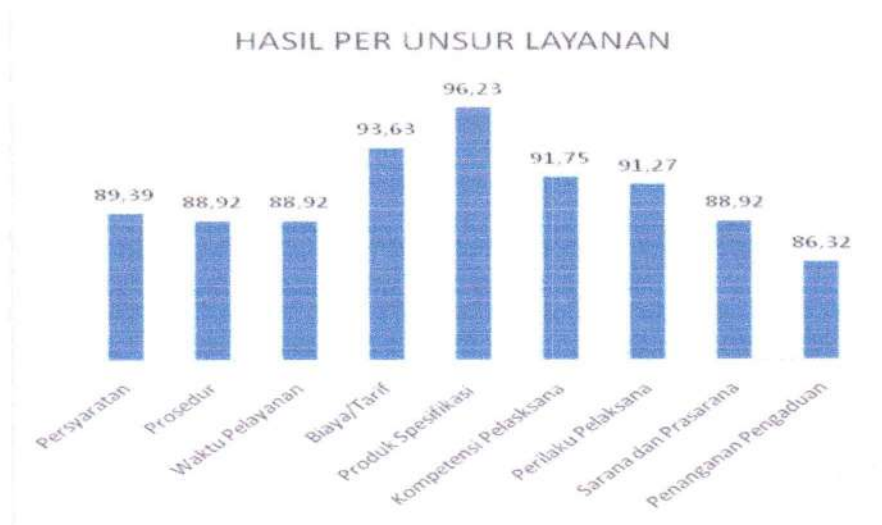


b. Karakteristik responden pada Pelayanan Kecamatan Watukumpul berdasarkan Pendidikan.



c. Indeks Nilai Perunsur Pelayanan

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM layanan Kecamatan Watukumpul tahun 2023, indeks per unsur pelayanan meliputi:



2. Saran Perbaikan dari Masyarakat

Terdapat saran perbaikan yang disampaikan langsung oleh masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat pada Kecamatan Watukumpul. Beberapa saran perbaikan tersebut antara lain:

- Sarana dan Prasarana Pelayanan terhadap pengaduan perlu dilengkapi untuk menciptakan keefektifan dan kenyamanan pelayanan;
- Tingkatkan Senyum, Salam, Sapa.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka berikut ini disimpulkan beberapa hal:

1. Rangkuman hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang :

No	Unsur Layanan	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2	3	4
1	Syarat	89,39	Sangat Baik
2	Prosedur	88,92	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	88,92	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	93,63	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi	96,23	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	91,75	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	91,27	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	88,92	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	86,32	Sangat Baik
IKM		90,50	Sangat Baik

2. Sesuai dengan indeks yang diperoleh, maka jika merujuk pada pengkategorisasian mutu layanan dapat dikatakan bahwa kinerja **pelayanan publik** Kecamatan Watukumpul **masuk**

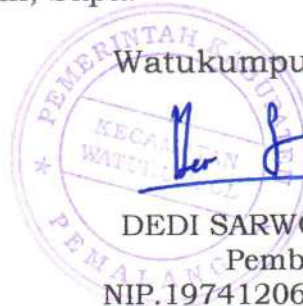
pada kategori A (Sangat Baik). Diantara 9 (Sembilan) layanan publik yang disurvei, 9 layanan memperoleh predikat sangat baik. Meskipun telah memperoleh predikat sangat baik dalam hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, penyelenggara layanan hendaknya tidak cepat berpuas diri dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

3. Unsur-unsur kepuasan masyarakat yang menjadi perhatian pengguna pelayanan agar dapat ditingkatkan adalah :
 - a. Penanganan Pengaduan

B. Saran

- a. Sarana dan Prasaran Pelayanan terhadap pengaduan perlu dilengkapi untuk menciptakan keefektifan dan kenyamanan pelayanan;
- b. Tingkatkan Senyum, Salam, Sapa.

Watukumpul, 3 Januari 2024



DEDI SARWOAJI, A.P.,MH
Pembina Tk. I
NIP.19741206 199311 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL**

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PERANGKAT DAERAH/ UPT KABUPATEN PEMALANG
BULAN/ TRI WULAN/ SEMESTER II TAHUN 2023

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : Kecamatan Watukumpul
90,50	<p>RESPONDEN Jumlah : 106 Orang Jenis Kelamin : L= 72 / P= 34 Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak Sekolah : 1• SD : 5• SMP : 4• SMA : 49• Diploma : 19• Sarjana : 28• S2/S3 : 0 <p>Periode Survei = Agustus s/d Desember 2023</p>

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan, masukan Anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit Kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat

Watukumpul, 3 Januari 2024

DEDI SARWOAJI, A.P.,MH
Pembina Tk. I

NIP.19741206 199311 1 001

**INSTRUMEN PENGOLAHAN DATA KEPUASAN MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN**

PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEMESTER II TAHUN 2023

UNIT PELAYANAN : KECAMATAN WATUKUMPUL
ALAMAT : JL. RAYA WATUKUMPUL NO. 61
TELEPON/HP. :0821 3416 2962

NO. RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KET.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
64	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
65	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
71	3	3	2	4	4	2	2	3	2	
72	2	2	2	2	4	3	2	2	2	
73	3	3	3	4	4	3	3	3	2	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
75	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
76	3	3	4	3	4	3	3	3	3	
77	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
78	3	3	2	2	3	4	4	3	3	
79	4	4	4	4	4	4	4	2	3	
80	3	3	2	4	3	3	3	3	3	
81	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	4	3	4	4	3	3	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	3	2	3	3	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	4	4	4	4	3	4	4	3	3	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	3	2	3	3	4	4	4	4	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
106	3	3	2	4	3	3	3	3	3	
ΣNilai /Unsur	379	377	377	397	408	389	387	377	366	
NRR / Unsur	3,575	3,557	3,557	3,745	3,849	3,670	3,651	3,557	3,453	
NRR tertbg/ unsur	0,397	0,395	0,395	0,416	0,427	0,407	0,405	0,395	0,383	*)
IKM Unit Pelayanan										**) 3,620
IKM Unit Pelayanan										**) 90,502

Keterangan :
 - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-
U1	Persyaratan	3,58
U2	Prosedur	3,56
U3	Waktu Pelayanan	3,56
U4	Biaya/Tarif	3,75
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayan	3,85
U6	Kompetensi Pelaksana	3,67

**PENGOLAHAN DATA KEPUJIAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEMESTER II TAHUN 2023**

UNIT PELAYANAN : KECAMATAN WATUKUMPUL
 ALAMAT : JL.RAYA WATUKUMPUL NO. 61
 TELEPON/HP. : 0821 3416 2962

NO. RESP	Umur				J. Kelamin		Status				Pendidikan						Pekerjaan								
	<13 s/d 16 Tahun	17 s/d 20 Tahun	21 s/d 40 Tahun	40 s/d >60 Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Belum Kawin	Kawin	Janda	Duda	Tidak Lulus SD	SD	SLT P	SLT A	Diploma	Sarjana/D4	S2/S3	Pelajar	Pedagang	Buruh	Wiraswasta	Petani	TNI/POLRI/PNS	BUMN/BUMD	Lainnya
88			1			1		1							1										1
89		1			1		1					1													1
90			1		1		1							1								1			1
91		1			1		1							1				1							1
92			1			1		1							1										1
93				1	1			1						1											1
94				1	1			1							1										1
95				1	1			1						1											1
96				1	1			1						1											1
97				1	1			1						1											1
98				1	1			1						1											1
99				1	1			1						1											1
100				1	1			1						1											1
101				1	1			1						1											1
102		1				1		1								1			1						1
103			1			1								1								1			1
104			1			1		1						1											1
105		1				1		1					1												1
106			1			1		1						1								1			1
JUMLAH	0	18	52	36	72	34	35	64	0	4	1	5	4	49	19	28	0	14	5	3	22	2	9	0	51

Keterangan
 Umur
 1 : <13 s/d 16
 2 : 17 s/d 20
 3 : 21 s/d 40
 4 : 40 s/d >60


 Watukumpul, 3 Januari 2024
 Camat Watukumpul

 DEDI SARWOAJI, A.P.,MH
 Pembina Tk.I
 NIP.197412061993111001

Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Produk Spesifikasi	Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Prasarana	Pengaduan
89,39	88,92	88,92	93,63	96,23	91,75	91,27	88,92	86,32



**INSTRUMEN PENGOLAHAN DATA KEPUASAN MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN**

PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEMESTER II TAHUN 2023

UNIT PELAYANAN : KECAMATAN WATUKUMPUL
ALAMAT : JL. RAYA WATUKUMPUL NO. 61
TELEPON/HP. :0821 3416 2962

NO. RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KET.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah kuesioner yang terisi						U7	Perilaku Pelaksana			3,65
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111						U8	Sarana dan Prasarana.			3,56
per unsur						U9	Penanganan Pengaduan, Saran, N			3,45

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

IKM UNIT PELAYANAN :	90,50
	SANGAT BAIK

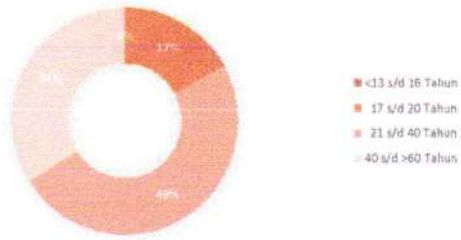
Watukumpul, 3 Januari 2024

Camat Watukumpul

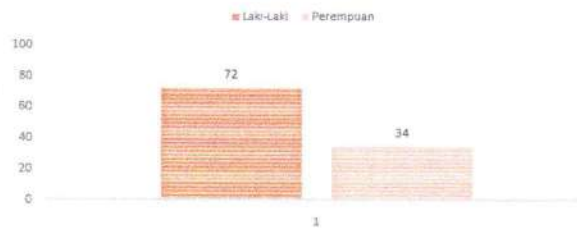


DEDI SARWOAJI, A.P.,MH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19741206 199311 1 001

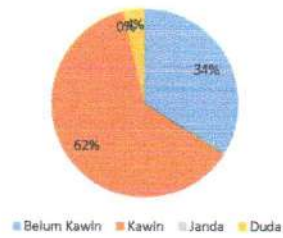
UMUR



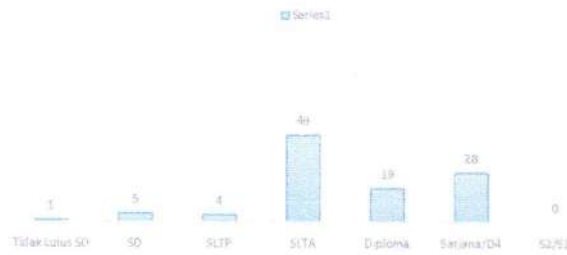
JENIS KELAMIN



STATUS



PENDIDIKAN



PEKERJAAN

